

**LAPORAN TATA KELOLA**  
**PT. BPR**  
**NUSANTARA BONA PASOGIT 12**



**TAHUN 2020**

**Kantor Pusat:**

**Jl. Raya Puspitek Kp. Pondok Benda Rt. 003/004 Buaran-Serpong**

**Kota Tangerang Selatan 15416**

**Telp (021) 7561275 – fax (021) 7566648**

**Email: [bpr\\_nbp12@yahoo.com](mailto:bpr_nbp12@yahoo.com)**

## Daftar Isi

Daftar isi .....	i
Daftar Lampiran.....	ii
Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT. BPR Nusantara Bona Pasogit	
12.....	1
A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	2
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris .....	5
C. Penanganan Benturan Kepentingan .....	6
D. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite.....	7
E. Kepemilikan Saham Anggota Direksi.....	11
F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	11
G. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris.....	11
H. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.....	12
I. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris	12
J. Rasio Gaji tertinggi dan Gaji Terendah.....	13
K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....	13
L. Jumlah Penyimpangan Intern yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR.....	15
M. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR.....	16
N. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	16
O. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana.....	16
P. Kesimpulan Umum Hasil Self Assesment Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> .....	16

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1 : 11 Notulen Rapat yang dilakukan Dewan Komisaris dan Direksi  
Tahun 2020
2. Lampiran 2 : Daftar Pemberian Kredit Kepada Pihak Terkait
3. Lampiran 3 : Daftar Penempatan Bank Lain Deposito Terhadap Pihak Terkait
4. Lampiran 4 : Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Perjanjian  
kerjasama PT. BPR NBP 12 dengan kantor akuntan publik
5. Lampiran 5 : Lembaran Pengesahan Rencana Kerja Tahun 2020
6. Lampiran 6 : Hasil Penerapan Tata Kelola PT. BPR NBP 12 Tahun 2020
7. Lampiran 7 : Print Out Laporan Tahunan di Website PT. BPR NBP 12
8. Lampiran 8 : Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 01 tanggal 3 Nopember 2020
9. Lampiran 9 : Daftar rincian Remunerasi dan Fasilitas Pengururs PT. BPR NBP 12

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 12

PERIODE 2020

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan di masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemongan pada prinsip-prinsip GCG. BPR NBP 12 terus berupaya agar setiap kegiatan usaha BPR tetap berpedoman dengan GCG dan dalam setiap tahunnya meningkatkan agar penerapan GCG semakin meningkat dan dilekaskan dalam seluruh jenjang organisasi. Adapun penjelasannya sebagaimana akan dibahas pada laporan ini.

Tujuan pelaksanaan GCG di BPR Nusantara Bona Pasogit 12

- A. Meningkatkan kinerja Bank dengan menetapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank
- B. Menjaga agar kegiatan operasional Bank, mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku
- C. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada stakeholders
- D. Memperbaiki budaya kerja Bank
- E. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah
- F. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank

Laporan pelaksanaan tata kelola di BPR Nusantara Bona Pasogit 12 disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2020:

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Penanganan Benturan Kepentingan
- D. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- E. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- G. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- H. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

- I. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- J. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- L. Jumlah Penyimpangan Intern
- M. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- N. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- O. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal maupun Penerima Dana
- P. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.

## A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

### 1. Susunan Direksi

Susunan Direksi BPR NBP 12 sampai dengan akhir periode 2020 terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Bisnis dengan rincian sbb:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Rudy Bodewyn Mangasa Tua	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	14/07/2019- 14/07/2022

### 2. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi belum lengkap sesuai ketentuan :

- a. Sesuai dengan RUPS tanggal 3 Nopember 2020 dan Akta Notaris No. 01 tanggal 3 Nopember 2020, perihal pengunduran diri Direktur Utama sehingga Dewan Direksi terdiri dari 1 (satu) orang dengan komposisi sebagai berikut:

- Direktur : Rudy Bodewyn  
Mangasa  
Tua

- b. Kriteria dan Independensi Direksi BPR NBP 12

No	Kriteria	Direktur	
		Iya	Tidak
1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√	
2	Tidak memiliki hubungan keluarga/ Semenda dengan	√	

	sesama Direksi atau Komisaris		
3	Tidak memiliki saham 25% atau lebih dari Modal Setor Bank	√	
4	Memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian sertakemampuan sebagaimana diatur oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.	√	
5	Telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) sesuai dengan ketentuan yang mengatur.	√	
6	Tidak merangkap jabatan pada Bank/ perusahaan lain	√	
7	Tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas & wewenang tanpa batas	√	

### 3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR:
  - Pelaksanaan dan penatausahaan kegiatan operasional
  - Menetapkan peraturan perusahaan dan evaluasi dalam pelaksanaannya
  - Merencanakan dan menetapkan sistem operasional Bank
  - Menetapkan kebijakan tentang ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan operasional Bank dan pembagian tugas yang jelas.
  - Menetapkan visi dan misi Bank serta evaluasinya
  - Pengendalian asset BPR
  - Pencapaian tingkat kesehatan Bank secara wajar
  - Melakukan pengendalian terhadap biaya
  - Melakukan pengembangan terhadap produk, jaringan kantor dan sumber daya manusia
  - Mengevaluasi pelaksanaan Bank, peraturan perusahaan dan hasil kinerja seluruh karyawan
  - Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan volume usaha Bank dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi Bank.
  - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari uditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
  - Memberikan persetujuan pinjaman bersama dengan komite kredit lainnya sesuai peraturan yang telah ditetapkan dalam SK Direksi
  
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan:

- Menetapkan arah kebijakan dan memimpin perusahaan.
  - Memimpin, mengurus dan menguasai serta memelihara perusahaan yang bertujuan untuk kepentingan perusahaan.
  - Mewakili perusahaan dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar kegiatan internal perusahaan dan dalam hubungan kerja dengan pihak ketiga
  - Mewakili dan menerima kuasa Dewan Komisaris jika berhalangan untuk berhubungan dengan pihak ketiga
  - Menetapkan dan mengatur segala ketentuan yang berkaitan dengan kepegawaian dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
  - Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
  - Mengangkat dan memberhentikan karyawan.
  - Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Menetapkan kebijakan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan operasional Bank dengan pembagian tugas yang jelas
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Telah dilaksanakan penunjukan Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan.
  - Telah diangkat Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan serta Manajemen Resiko.
  - Telah melengkapi dan melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kerja.
- d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya:
- Melakukan tindak lanjut dan perbaikan atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan batas waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.
- e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
- pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
  - penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.

- f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- g. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

## B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

### 1. Susunan Dewan Komisaris

Susunan dewan komisaris sampai dengan akhir periode 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	ABRAHAM THEO PASABAM S.	KOMISARIS UTAMA	17/01/2020- 17/01/2023
2	WIRASNO	KOMISARIS	31/05/2018- 31/05/2021

### 2. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan:

- a. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi
- b. Komposisi dewan Komisaris BPR NBP 12 akhir tahun 2020:
  - Komisaris Utama: Abraham Theo Pasabam S, SH
  - Komisaris : Wirasno

### 3. Kriteria dan independensi Dewan komisari BPR NBP 12

N	Kriteria	Komisaris Utama		Komisaris	
		Iya	Tidak	Iya	Tidak
1	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		√	√	
2	Tidak memiliki hubungan keluarga/ Semenda dengan sesama Direksi atau Komisaris	√		√	
3	Telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (fit & proper test) sesuai dengan ketentuan yang mengatur.	√		√	
4	Tidak merangkap lebih dari 2 (dua) jabatan dengan jabatan yang sama pada Bank/ perusahaan lain	√		√	
5	Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi/ Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS	√		√	



atau pada Bank Umum				
---------------------	--	--	--	--

#### 4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas & tanggung jawab secara independen
- b) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- d) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- e) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
  - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- f) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- g) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

### C. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pengurus dan Pegawai Bank. Untuk itu Bank telah melakukan langkah-langkah mencegah benturan kepentingan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menerbitkan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan segala bentuk aktivitas kegiatan perusahaan, baik itu dalam bentuk Surat Keputusan Direksi ataupun dalam bentuk Standar Prosedur Operasi.
2. Penegasan rangkaian tugas dan tanggung jawab setiap karyawan dalam bentuk Deskripsi Pekerjaan (jobdesck).
3. Meningkatkan pengetahuan karyawan melalui program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh perusahaan sendiri atau melalui lembaga pendidikan lainnya.

## **D. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE**

### **1. Fungsi Kepatuhan**

- a) Sdr. Wahidin Hutape telah mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT BPR Nusantara Bona Pasogit 12 yang telah disetujui berdasarkan keputusan Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) nomor 1 tertanggal 30 November 2020, sehingga Direktur Utama sebagai penanggung jawab pelaksanaan fungsi kepatuhan menjadi kosong.
- b) Sehubungan Direktur Utama yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak dapat hadir dari tanggal 17 Juni 2020 (sudah dilaporkan) dimana tugas Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT telah diserahkan kepada PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT melalui notulen rapat komisaris tanggal 22 Juni 2020 dan telah dilakukan serah terima sementara Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko tanggal 3 Juli 2020. Dikarenakan dari tanggal tersebut diatas Direktur Utama yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak dapat hadir dan mengundurkan diri pada tanggal 30 November 2020 maka kekosongan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT masih dilaksanakan oleh PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT.
- c) Berdasarkan akta notaris nomor 1 tanggal 30 november 2020 perihal menyetujui pencalonan Tuan Rudy Bodewyn Mangasa Tua sebagai Direktur Utama dan Tuan Ananditya sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang terlebih dahulu diajukan kepada otoritas jasa keuangan untuk mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
- d) PT. BPR NBP 12 telah mengangkat Sdri. Arta Metia Sami Sagala sebagai Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT melalu SK Direksi nomor 53.A/SDM/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017. Dan telah mendapat persetujuan OJK nomor S-55/KR.0113/2018 tanggal 25 Januari 2018
- e) Telah diterbitkan SK Direksi no SK/DIR/026/V/2019 tentang Perubahan Stuktur Organisasi dimana legal menjadi bagian dari kepatuhan dimana sebelumnya bagian dari operasional, hal ini dilakukan agar sebelum pencairan legal memastikan semua dokumen kredit telah sesuai dengan ketentuan dan dapat mengambil langkah preventif sebelum pencairan kredit dilakukan
- f) Direktur dan Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur Operasional (SOP), peraturan OJK dan BI, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain:
- Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan job description dan struktur organisasi Bank.
  - Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
  - Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/ mengadakan sosialisasi ke divisi/ bagian, kantor cabang atau kantor kas.
  - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
  - Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
  - Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
  - Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Untuk penerapan fungsi Kepatuhan,
3. pejabat eksekutif kepatuhan telah melakukan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan yang telah dilakukan antara lain adalah dengan mengadakan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal (Ketentuan BI/OJK). Adapun sosialisasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut
- pelaksanaan training terhadap fungsi kepatuhan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020:

- a). Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif

No	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Unit Kerja	Tanggal
1	Leadership 360	Komisaris & Direksi	20-02-2020
2	Sisdur APU & PPT 2.0	Direksi	20-03-2020
3	Memaknai Restrukturisasi Kredit	Direksi	15-04-2020
4	Business Continuity Plan (BCP)	Direksi, Kepala Cabang	29-04-2020
5	OBJECTIVE & KEY RESULT RBB	Direksi & Kabag. Operasional	12-11-2020
6	Profile Risiko	PE Kepatuhan	08-01-2020
7	Mitigasi Risiko Operasional & Likuiditas	PE Kepatuhan	20-05-2020
8	Strategi Pengelolaan Risiko BPR	PE Kepatuhan	15-07-2020
9	8 Langkah Efektif Pengelolaan SDM	Kacab, PE Kepatuhan	12-02-2020
10	Creative Action	Kepala Cabang	03-07-2020

11	Installing Ethos	Kepala Cabang, PE Kepatuhan, Kabag. Operasional & Internal Audit	26-08-2020
12	Satuan Kerja Audit Internal	Internal Audit	04-09-2020

b). Unit kerja operasional

No	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Unit Kerja	Tanggal
1	Satuan Kerja Audit Internal	Staff Internal Audit	04-09-2020
2	Karyawan di Atas Garis	Seluruh Karyawan	08-02-2020
3	Sosialisasi Modul Transfer Lapbul OJK	EDP	26-02-2020

c). Unit kerja marketing dan remedial

No	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Unit Kerja	Tanggal
1	Becoming Great Sales Person	AO Lending	22-01-2020
2	Collection Skill	Remedial	13-03-2020
3	Creative Action	AO Lending	03-07-2020
4	Installing Ethos	AO Lending & Remedial	26-08-2020
5	Level Credit Officer	AO Lending	12-03-2020
6	Menikmati Promosi Digital	AO Lending	24-07-2020
7	Public Speaking dimasa Pandemi	AO Funding	06-10-2020
8	Self Healing	AO Lending & AO Funding	24-06-2020

d). Kepada seluruh karyawan PT. BPR NBP 12 telah melaksanakan pelatihan tentang SK DIR tentang potongan kehadiran dan keterlambatan kepada seluruh karyawan 13 Januari 2020

e). Kepada seluruh karyawan telah dilaksanakan sosialisasi pemberlakuan kebijakan dan prosedur penerapan APU PPT pada tanggal 1 April 2020

4. Pemantauan pemenuhan komitmen

Komitmen PT. BPR NBP 12 kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Otoritas	Permasalahan	Realisasi
1	Otoritas Jasa Keuangan	1. Pelanggaran BMPK Terkait	Telah disampaikan kepada OJK melalui surat no 357/Adm/X/2020 tertanggal 2 Oktober 2020

2	Otoritas Jasa Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permintaan perbaikan system teknologi kepada PT NBP selaku Vendor</li> <li>2. Laporan Progress Pengikatan di Notaris</li> </ol>	Telah disampaikan kepada OJK melalui surat no 386/Adm/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020
3	Otoritas Jasa Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koreksi Laporan Bulanan</li> </ol>	Telah disampaikan kepada OJK melalui sistem pelaporan OJK Online tertanggal 5 Oktober 2020

#### 5. Audit Intern

Dengan keberadaan Audit Internal sesuai dengan fungsi dan tugasnya di sebuah Bank, dan dari hasil laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan akan dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan berguna untuk pihak manajemen guna melakukan tindakan antara lain:

- a) Sebagai dasar dilakukannya review atas laporan/ informasi Keuangan atau Entitas pada Perusahaan
- b) Sebagai dasar dilakukannya evaluasi/ perbaikan terhadap kondisi kegiatan usaha yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c) Dapat mengetahui potensi dan ancaman utama yang harus dihadapi oleh pihak manajemen sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan perancangan kebijakan guna menghadapi ancaman tersebut dan tetap dapat menghasilkan keuntungan serta menghindari efek buruk dari tantangan tersebut.

#### 6. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Terhadap kondisi BPR NBP 12 dengan Modal Inti sampai dengan akhir tahun 2020 berada di bawah 50.000.000.000,- (lima puluh milyar), pemenuhan struktur minimal yang harus dan telah dipenuhi adalah dengan komposisi antara lain dimana salah satu dari dua orang Direksi ditunjuk untuk membawahi fungsi Kepatuhan & Manajemen Resiko dengan dibantu oleh Pejabat Eksekutif dalam pelaksanaan kerjanya sesuai dengan peran dan fungsi yang dapat memberikan dampak yang positif antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain melakukan pengawasan dalam bentuk memberikan saran dan masukan serta memastikan segala proses kegiatan yang sedang berlangsung telah sesuai dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- b) Fungsi Audit Internal Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain melakukan pengawasan terhadap hasil dari kegiatan pekerjaan dan terhadap hasil pemeriksaan untuk dijadikan sebagai informasi kepada pihak manajemen agar dapat dilakukan perbaikan.
  - c) Fungsi Manajemen Risiko Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain memberikan saran dan masukan serta penjelasan kepada pihak manajemen terhadap risiko yang akan timbul terhadap kebijakan yang akan diterapkan dan memberikan solusi bagaimana mengelola risiko tersebut sehingga apa yang telah direncanakan dapat tetap terlaksana dengan tidak mengabaikan risiko yang akan terjadi.
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR NBP 12, terhitung mulai berdiri hingga akhir periode tahun 2020, dalam kegiatan penyaluran kredit belum melakukan memberikan plafond kredit dengan nominal sama dengan atau melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Hal ini dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya.
  8. Rencana Bisnis BPR BPR NBP 12, dalam upaya menumbuh kembangkan usaha bisnis berkeinginan dan bercita-cita untuk dapat tumbuh menjadi BPR yang besar dengan kualitas kesehatan yang optimal. Dan guna mewujudkan cita-cita tersebut telah menetapkan prinsip pertumbuhan dengan pola rembesan air.

#### **E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI**

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	BPR Nusantara Bona Pasogit	Perusahaan Lain
<b>Rudy Bodewyn MT</b>	-	-

#### **F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

#### **G. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	BPR NBP 12	BPR NBP 11	Perusahaan Lain

<b>Abraham Theo Pasabam</b>	-	-	-
<b>Wirasno</b>	6 %		-

## H. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

- Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

## I. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2020.

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
		Dewan Komisaris	Direksi
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	345.250.000	582.150.000
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) yang *)	-	30.000.000
	a. Dapat dimiliki	27.323.200	46.954.200
	b. Tidak dapat dimiliki		2 Unit Mobil Dinas

2. Berikut informasi Jumlah remunerasi dalam 1 (satu) tahun untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi bila dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
<b>Diatas Rp. 2 Milyar</b>		

<b>Diatas Rp. 1 Miliar s/d 2 Miliar</b>		
<b>Diatas Rp. 500 juta s/d 1 Miliar</b>		
<b>Rp. 500 juta kebawah</b>	<b>2 orang</b>	<b>2 orang</b>

#### J. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 4,03 kali
- b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,82 kali
- c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah: 1,31 kali
- d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi: 2,42 kali
- e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi: 3,86 kali

#### K. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat-rapat Dewan Komisaris pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	a. Pembahasan mengenai Notulen rapat sebelumnya b. Persiapan RUPS Tahunan c. Pembahasan mengenai perkembangan Usaha Januari 2020 d. Tindakan strategis yang akan dilakukan e. Laporan internal audit	28 Februari 2020	7 orang
2	a. Langkah – langkah yang akan dilakukan dalam mencapai target sesuai RBB 2020 b. Pembahasan mengenai NPL Produk KKM c. Pembahasan 4 Debitur NPL Terbesar	19 Maret 2020	4 orang
3	a. Persiapan agenda RUPS Tahunan	16 Maret 2020	5 orang
4	a. Pembahasan mengenai perkembangan usaha sampai dengan bulan April 2020 b. Pembahasan mengenai kondisi saat ini (Covid-	4 Mei 2020	6 orang



	<p>19)</p> <p>c. Pembahasan mengenai debitur yang telah direstruktur dan yang akan di restruktur</p> <p>d. Pembahasan mengenai pendapatan dan biaya untuk melihat proyeksi laba rugi Mei 2020</p>		
5	<p>a. Pembahasan mengenai kredit bermasalah dan permasalahan hokum yang dihadapi BPR NBP 12</p> <p>b. Pembahasan mengenai debitur yang mendapat relaksasi covid-19 sampai dengan bulai Mei 2020</p> <p>c. Pembahasan mengenai perkembangan usaha bulan Mei 2020</p> <p>d. Laporan internal audit</p>	23 Juni 2020	6 orang
6	<p>a. Pembahasan mengenai notulen rapat sebelumnya</p> <p>b. Pembahasan mengenai perkembangan usaha Juni 2020</p> <p>c. Pembahasan mengenai hasil Temuan IC</p>	23 Juli 2020	6 orang
7	<p>a. Pembahasan mengenai notulen rapat sebelumnya</p> <p>b. Pembahasan mengenai hasil temuan IC</p> <p>c. Pembahasan mengenai perkembangan usaha sampai dengan Juli 2020</p> <p>d. Pembahasan mengenai APU PPT</p> <p>e. Pembahasan mengenai debitur yang direstrukturisasi covid-19</p> <p>f. Pembahasan mengenai langkah-langkah yang dilakukan</p>	28 Agustus 2020	6 orang
8	<p>a. Pembahasan mengenai notulen rapat sebelumnya</p> <p>b. Pembahasan kebijakan-kebijakan yang akan dirumuskan</p> <p>c. Pembahasan mengenai hasil temuan IC</p> <p>d. Pembahasan mengenai perkembangan usaha sampai dengan Agustus 2020</p> <p>e. Pembahasan mengenai laporan PE Kepatuhan, manajemen risiko dan APU PPT</p>	18 September 2020	6 orang
9	<p>a. Pembahasan mengenai hasil perkembangan usaha bulan November 2020</p> <p>b. Langkah-langkah yang akan dilakukan</p> <p>c. Hasil Temuan IC</p> <p>d. Laporan PE Kepatuhan, Manajemen Risiko &amp;</p>	22 Desember 2020	7 orang

	APU PPT		
10	a. Pembahasan Mengenai hasil penilaian SWOT b. Arahan RBB dari PT NBP c. Kinerja Ringkasan Eksekutif RBB 2021 d. Strategi yang akan dilakukan	23 November 2020	7 Orang
11	a. Pembahasan mengenai calon direktur an Ananditya b. Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan tahun 2021 c. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target 2021	21 Januari 2021	7 orang

## 2. Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Abraham Theo Pasabam S	10	10	100%
Wirasno	10	10	100%
Total rapat per tahun	10		

## L. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti		0		0		0		0

melalui proses hukum							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

**M. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR**

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam proses penyelesaian	0	
Total	0	

**N. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

**O. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA**

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)	Tanggal

**P. Kesimpulan umum hasil Self Assessment Pelaksanaan *Good Corporate Governance***

Berdasarkan hasil self assessment pelaksanaan GCG PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 12 periode Desember 2020, disampaikan hal-hal berikut:

1. Nilai Komposisi GCG sebesar dengan prediksi sangat baik
2. Peringkat masing-masing faktor adalah:

No	Aspek yang dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	10 %	1.83	0.28
2	Pelaksanaan tugas dan Tanggungjawab Dewan Direksi	20%	2.07	0.41
3	Kelengkapan dan pelaksanaan Tugas Komite	10%	0	0
4	Penanganan benturan kepentingan	10%	2.50	0.25
5	Penerapan fungsi kepatuhan	5%	2.89	0.29
6	Penerapan fungsi audit intern	5%	2	0.20
7	Penerapan fungsi audit ekstern	5%	2	0.05

8	Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern	7.5%	2.17	0.22
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.5%	2	0.15
10	Rencana strategis BPR	15%	2	0.15
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	5%	2.50	0.19
	Nilai komposit	100%		2.18
	Prediksi komposit			Sangat Baik

3. Kekuatan pelaksanaan GCG
  - a. Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 12 tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - b. Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif
  - c. Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan dewan Komisaris
  - d. Fungsi kepatuhan Bank, fungsi Audit Intern, dan fungsi audit Ekstern akan berjalan sesuai dengan ketentuan GCG.
4. Kesimpulan self assesment tahun 2020 :
  - a. Jumlah anggota Direksi 1 (satu) orang, dimana Direktur Utama telah mengundurkan diri pada bulan Oktober 2020, dalam RUPSLB menyetujui pencalonan tuan Rudy Bodewyn Mangasa Tua sebagai Direktur Utama dan tuan Ananditya sebagai Direktur.
  - b. Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang, Bukan Komisaris Independen.
  - c. BPR belum wajib membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko karena Modal Inti BPR dibawah 50 Milyar
  - d. BPR belum memiliki pedoman penanganan Benturan Kepentingan akan tetapi setiap pengambilan keputusan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak terdapat benturan kepentingan
  - e. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah mengundurkan diri pada bulan oktober 2020 dan dalam RUPSLB telah menunjuk tuan Ananditya sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
  - f. BPR telah memiliki pedoman Audit Intern dan PE Audit Intern terhadap kegiatan operasional BPR yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama
  - g. BPR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan Audit terhadap kinerja BPR tahun 2020 dengan Opini “Laporan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang materil, posisi keuangan BPR untuk tahun 31 Desember 2020 sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

- h. BPR telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang sudah disosialisasikan
- i. BPR telah memiliki pedoman BMPK namun belum dievaluasi secara berkala dan setiap pemberian kredit Direksi telah memperhatikan BMPK agar tidak melampaui.
- j. Rencana Bisnis BPR tahun 2020 telah disusun dan disetujui oleh Dewan Komisaris
- k. Laporan keuangan disusun dengan ketentuan yang berlaku, serta Laporan Keuangan Triwulan sudah diumumkan setiap kantor Pusat dan Kantor Cabang dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu.

## NOTULEN RAPAT PENGURUS BULAN PERKEMBANGAN USAHA 2020

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 12

Tanggal : 28 FEBRUARI 2020, Tempat : Ruang Rapat PT.BPR NBP 12

### Peserta Rapat :

Abraham Theo P.S : Komisaris Utama  
Wirasno : Komisaris  
Wahidin Hutapea : Direktur Utama  
Rudy Bodewyn M.T : Direktur  
Ika : Kepala Cabang  
Lilya Kosnanda : Internal Audit  
Arla Sagala : PE Kenaluan

### Agenda Rapat :

1. Pembahasan mengenai notulen rapat sebelumnya
2. Persiapan RUPS Tahunan
3. Perkembangan Usaha bulan Januari 2020
4. Langkah-langkah yang akan dilakukan.
5. Hasil temuan IC

Rapat dimulai pada pukul : 11.00 WIB

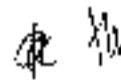
Rapat dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Wirasno

### Kepuluan Rapat :

- |   |   |
|---|---|
| 1. Pembahasan mengenai notulen rapat sebelumnya | a. Pembahasan mengenai seblur an. Ayu Fatmawati:<br>1. Telah dikirimkan surat ke Propam cc ke 6 oleh pak Darmanta dan sedang diupayakan performuan dengan Bpka Sregar karena penyidik sudah berganti<br>2. Akan membawa surat yang dikirim ke propam (fotokopi) langsung ke propam PIC Pak Wahidin dan Pak Darmanta |
|---|---|

*(Handwritten signature)*

3. Akan diupayakan untuk melakukan pertemuan dengan pengacara bapak Kelly YS
- b. Pembahasan mengenai debitur Syate :
1. Sudah dilakukan upaya penjualan jaminan melalui sebar brosur, media sosial, papan pengumuman, menawarkan kepada nasabah, melalui agen dan lainnya dengan penawaran tertinggi sebesar Rp. 300.000.000,-
  2. Tetap dilakukan upaya penjualan jaminan melalui sebar brosur, media sosial, papan pengumuman, menawarkan kepada nasabah, melalui agen
  3. Akan dilakukan penawaran penjualan jaminan kepada karyawan BPR NBP 12 rt. Mad Salin
- c. Pembahasan mengenai debitur an. Bondan.
1. Sudah dilakukan pelaksanaan yang pertama namun belum ada penitip
  2. Sudah dilakukan appraisal uang oleh KJPP
  3. Akan tetap melakukan upaya mencari pembeli sebelum dilakukn pelelangan kedua
  4. Akan diadakan pertemuan dengan anggota sindikasi pada hari Senin, 2 Maret 2020 dengan pengurus BPR NBP 14, BPR NBP 19 dan BPR NBP 12 untuk membahas perkembangan kredit an: Bondan, Yusuf Bachriar dan Siti Fania
- d. Pembahasan mengenai Rudi Novrian:

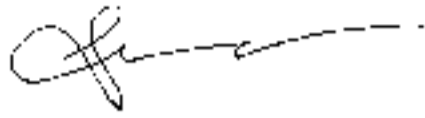


		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertipikat yang hilang sudah selesai dan akan dilakukan pemasangan HI namun debitur sudah tidak diketahui keberadaanya</li> <li>2. Akan tetap dilakukan musyawarah terhadap isi debitur agar jaminan dijual</li> <li>3. Melakukan upaya penjualan jaminan</li> </ol>
2	Persiapan RUPS Tahunan	a. RUPS Tahunan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2020
3	Perkembangan Usaha bulan Januari 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Labungan sebesar Rp. 9.274.567,- atau 100% dari target bulan Desember 2020</li> <li>b. Deposito sebesar Rp. 10.490.100,- atau sebesar 100% dari target Desember 2020</li> <li>c. Kredit yang diberikan sebesar Rp. 14.621.150,- atau 79% dari target Desember 2020</li> <li>d. Total pendapatan sebesar Rp. 579.217,- atau 7% dari target bulan Desember 2020</li> <li>e. Biaya sebesar Rp. 527.926,- sebesar 7% dari target bulan Desember 2020</li> <li>f. EBI sebesar Rp. 51.291,- atau sebesar 7% dari target bulan Desember 2020</li> <li>g. NPL sebesar 12,7% masih diatas target 5,93%</li> <li>h. PAR sebesar 20,45% masih diatas target 10%</li> </ol>
4	Tindakan langkah yang akan dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperhatikan NPL produk KKM yang sudah mencapai 19,02% himbauan Komisaris untuk dilakukan uji ulang terhadap produk KKM</li> <li>b. Akan dilakukan penilaian kepada AO khusus NPL kredit KKM</li> <li>c.</li> </ol>

*PR YW*



Rapat ditutup pada pukul 1600 WIB



**ABRAHAM THEO P.S**  
Ketua Rapat



**Arta Saqala**  
Notulis

# NOTULEN RAPAT KOMISARIS PERKEMBANGAN USAHA BULAN FEBRUARI

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 12

Tanggal : 19 MARET 2020, Tempat : Ruang Rapat PT.BPR NBP 12

## Peserta Rapat :

Abraham Theo P.S : Komisaris Utama  
Wirasno : Direktur Utama  
Lidya Rosmida : Internal Audit  
Aria Sagala : PE Kepatuhan

## Agenda Rapat :

1. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mencapai target sesuai RBB 2020
2. Pembahasan mengenai NPL Produk KKM
3. Pembahasan 4 Debitur NPL terbesar
4. Pembahasan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target RBB 2020

Rapat dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Wirasno

## Keputusan Rapat :

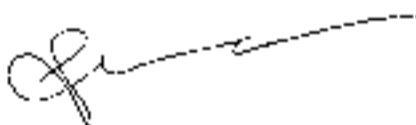
1	Pembahasan mengenai penghimpunan dana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat laporan deposito diatas counter rate dan diatas LPS dalam setiap rapat Dewan Komisaris PIC PE IC</li><li>2. Besar tabungan punai dibuahkan tabung tabungan setiap bulan dan yang akan diperoleh dalam satu tahun</li><li>3. Dalam formulir tabungan dibuat ketentuan umum tentang tabungan</li><li>4. Dilakukan pengacakan oleh PE IC transaksi reverse transaksi setiap fungsing</li><li>5. Ditinjau ulang Limit transaksi pengambilan tabungan nasabah oleh AC Funding di lapangan</li></ol>
2	Pembahasan mengenai NPL Produk KKM	<p>a. Penyebab NPL Produk KKM (19,48%) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. PE IC membuat laporan NPL KKM untuk menemukan konsentrasi masalahnya</li><li>2. Pola pembayaran debitur</li></ol> <p>b. Solusi untuk mengatasi NPL KKM:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan atau mencari pola pembayaran yang baru misalnya MCM</li></ol>

OR

14

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Akan dilakukan peninjauan masa kerja karyawan dalam persyaratan produk KKM minimal 3 tahun</li> <li>3. Jangka waktu dalam produk kredit KKM akan dilakukan peninjauan</li> <li>4. Akan meminta nomor kontak tempat debitur bekerja diminta dan dilakukan konfirmasi dalam persyaratan produk KKM</li> </ol>
<p>3. Pembahasan 4 Debitur NPL terbesar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris akan melakukan tinjauan lapangan kepada 4 debitur bersama dengan direksi jawa akan difentaskan dalam rapat pengurus</li> </ol>
<p>4. Pembahasan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target RBB 2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meminta direksi untuk segera memenuhi kekosongan KBM</li> <li>2. Pembahasan SK reward dan punishment dilakukan dengan konsisten dan dalam reward akan ditambahkan jumlah rekening baik yang ada maupun new khusus AO Lending</li> <li>3. Kebijakan terhadap AO yang tidak mencapai target dan tindakan yang diambil untuk target yang tidak tercapai diberikan kepada kepala bagian marketing</li> <li>4. Akan dilakukan analisa terhadap jaringan tidak produktif</li> </ol>

Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB



**ABRAHAM THEO P.S**  
Ketua Rapat



**Arta Sagala**  
Notulis

# NOTULEN RAPAT PENGURUS BULAN PERKEMBANGAN USAHA 2020

PT. BPR Nusanfara Bona Pasogit 12

Tanggal : 16 MARET 2020, Tempat : Ruang Rapat PT.BPR NBP 12

## Peserta Rapat :

Abranam Theo P.S : Komisaris Utama  
Wahidin Hutapea : Direktur Utama  
Rudy Badewyn M.T : Direktur  
Edya Rosminda : Internal Audit  
Ana Sagala : PT Kepatuhan

## Agenda Rapat :

1. Persiapan agenda RUPS Tahunan

Rapat dimulai pada pukul : 14.30 WIB

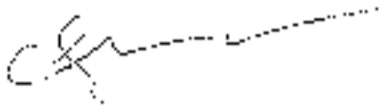
Rapat dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Wahidin

## Keputusan Rapat :

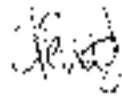
1. Pembahasan mengenai persiapan agenda RUPS Tahunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan tahunan diserahkan pada saat persidangan RUPS dengan disertai snack, kalender dan pulpen</li><li>2. Penggantian uang transport peserta RUPS Tahunan dan RUPSLB di persiapkan sebesar Rp. 2.000.000,-</li><li>3. Pfnl amsa tanggal: 18</li><li>4. Susunan acara</li><li>5. RBB 2020 ringkasan eksekutif</li></ol>
2. Susunan Acara RUPS Tahunan per 31 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembukaan</li><li>2. Pembacaan amsa dan doa pembukaan</li><li>3. Perhitungan umum</li><li>4. Agenda RUPS Tahunan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembacaan laporan pertanggungjawaban Direksi</li><li>b. Pembacaan laporan komisaris</li><li>c. Pengesahan laporan tahunan</li><li>d. Pengesahan gaji dan tunjangan-fasilitas pengurus tahun buku 2020</li><li>e. Perunjukkan KAP tahun buku 2020</li></ol></li><li>5. Agenda RUPS Luar biasa</li><li>6. Penandatanganan Notulen RUPS Tahunan dan RUPSLB</li></ol>

- 7. Penyampaian
- 8. Doa Penutup

Rapat ditutup pada pukul 17:30 WIB



ABRAHAM THEO P.S  
Ketua Rapat



Arta Segala  
Notulis

## NOTULEN RAPAT PENGURUS BULAN PERKEMBANGAN USAHA 2020

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 12  
Tanggal : 04 Mei 2020, melalui aplikasi Skype

### Peserta Rapat :

Abranam Theo P.S : Komisaris Utama  
Wirasno : Komisaris  
Wahidin Hutapea : Direktur Utama  
Rudy Badewyn M. : Direktur  
Lidia Rosmida : Internal Audit  
Ario Sagala : PE Kepaluan

### Agenda Rapat :

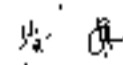
1. Pembahasan mengenai perkembangan usaha sampai dengan bulan April 2020
2. Pembahasan mengenai kondisi saat ini (covid-19)
3. Pembahasan mengenai debitur yang telah direstruktur dan yang akan di restruktur
4. Pembahasan mengenai Pendapatan dan Biaya untuk melihat proyeksi Laba rugi Mei 2020

Rapat dimulai pada pukul : 12.00 WIB

Rapat dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Wirasno

### Keputusan Rapat :

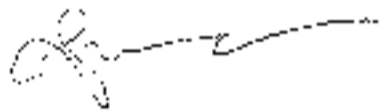
1. Pembahasan mengenai perkembangan usaha sampai dengan bulan April 2020	a. Tabungan sebesar Rp. 9.059.326,- atau 101% dari target bulan Desember 2020 b. Deposito sebesar Rp. 10.184.100,- atau sebesar 99% dari target Desember 2020 c. Kredit yang diberikan sebesar Rp. 14.661.140,- atau 79% dari target Desember 2020 d. Total pendapatan sebesar Rp. 2.117.500,- atau 27% dari target bulan Desember 2020 e. Biaya sebesar Rp. 2.229.250, sebesar 31% dari target bulan Desember 2020 f. EBT sebesar Rp. 111.750,- atau sebesar 17% dari target bulan Desember 2020 g. NPL sebesar 13,47% masih diatas target 5,91% h. PAR sebesar 36,62% masih diatas target 10%
--	--



2	Kondisi saat ini ditengah pandemi covid-19	<p>a. Terdapat 8 debitur dengan baki debit Rp. 906.000.000,- debitur yang tidak dapat membayar pokok yang menyebabkan turun menjadi PAR 1</p> <p>b. Telah dilakukan pencairan terhadap ABA Deposito ke Giro maksimal 4,5 M untuk menjaga likuiditas terkait adanya penarikan tabungan an. Agus Kurniawan sebesar Rp. 518.700.000 per 04 Mei 2020</p> <p>c. Agar dilakukan upaya menjaga likuiditas BFR terutama terhadap 17 nasabah penabung</p>
3	restrukturisasi	<p>Terdapat 33 debitur yang mengajukan untuk dilakukan restrukturisasi dimana</p> <p>a. 2 fasilitas kredit yang telah di analisis dan di telak untuk dilakukan restrukturisasi karena usaha tidak terdampak covid-19 an. Hafiz Fakturichman.</p> <p>b. Terdapat 3 debitur sudah dijalankan restrukturisasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tjarur Diatmojo kredit berjangka plafond Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) diberikan perpanjangan waktu 12 bulan dan penurunan suku bunga menjadi 2,5% dari 2,75%</li> <li>2. Hariyani Plafond kredit berjangka Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diperpanjang 3 bulan kedepan</li> <li>3. Aidi Gunawan Plafond Rp. 583.333.300,- (lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) penundaan pembayaran pokok 6 bulan dan pengurangan angsuran bunga menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)</li> </ol> <p>c. 13 Debitur sudah mempersiapkan data data</p> <p>d. 13 debitur akan segera dilindaklanjuti</p> <p>a. Akan dilinat secara proaktif sebesar Rp. 1,1 M dari current yang turun ke PAR 1 dan hasilnya akan disampaikan Direksi kepada</p>
	Langkah-langkah yang dilakukan	

	<p>Komisaris pada pertengahan bulan Mei 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penyaluran kredit diarahkan ke sektor-sektor yang tidak terdampak covid-19 seperti ke sektor pertanian, tenaga kesehatan, dll</li> <li>c. Tetap dilakukan upaya untuk penyelesaian kredit NPL 4 debitur terbesar (Ayu Fatmawati, Bondan, Syafei dan Rudy Noyran)</li> <li>d. Akan dilakukan perimbangan untuk melakukan lelang jaminan an. Ayu Fatmawati</li> </ul>
<p>4. Pembahasan mengenai Pendebaran dan Biaya proyeksi Laba Rugi Mei 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Akan dibuatkan proyeksi Laba Rugi sampai dengan Mei 2020 dan akan disampaikan kepada komisaris</li> </ul>

Rapat ditutup pada pukul 14:00 WIB



**ABRAHAM THEO P.S**  
Ketua Rapat



**Arta Sagala**  
Notulis



## NOTULEN RAPAT KOMISARIS BULAN JUNI 2020

PT. BPR Nusahara Bona Pasagi 12

Tanggal: 22 Juni 2020, di ruang rapat kamar pusat

### Peserta Rapat:

Abdullah Muzakki	Ketua Komisaris
M. Nurul	Anggota
Rizki Nur Hafidha	Anggota
Fitri Rahmawati	Anggota
Fitri	Anggota
Ahmad Sugito	Anggota

### Agenda Rapat:

1. Pembacaan agenda rapat dan pembahasan buku yang diterbitkan BPRM 12
2. Pembacaan agenda rapat yang mendapat kendala covid 19 sesuai dengan aturan MHR 2020
3. Pembacaan agenda rapat yang mendapat kendala covid 19 Mei 2020
4. Mengetes dan mengkonfirmasi keabsahan

Rapat dimulai pada pukul: 10.26 WIB

Rapat dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Wahono

### Keputusan Rapat:

1. Pembacaan agenda rapat dan pembahasan buku yang diterbitkan BPRM 12
  2. Pembacaan agenda rapat yang mendapat kendala covid 19 sesuai dengan aturan MHR 2020
  3. Pembacaan agenda rapat yang mendapat kendala covid 19 Mei 2020
  4. Mengetes dan mengkonfirmasi keabsahan
1. Mengetes dan mengkonfirmasi keabsahan
1. Mengetes dan mengkonfirmasi keabsahan
  2. Mengetes dan mengkonfirmasi keabsahan
  3. Mengetes dan mengkonfirmasi keabsahan
  4. Mengetes dan mengkonfirmasi keabsahan
1. Mengetes dan mengkonfirmasi keabsahan
1. Mengetes dan mengkonfirmasi keabsahan
  2. Mengetes dan mengkonfirmasi keabsahan
  3. Mengetes dan mengkonfirmasi keabsahan
  4. Mengetes dan mengkonfirmasi keabsahan





Kontribusi... rencana...  
perolehan...  
tahun... Mei 2020

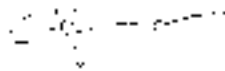
- 3. Tahun 2019 Rp. 87.500.000 (sewa panel K...  
2019)
- 4. Momen: April 2020, ...  
Belasungk...
- 5. Biaya listrik Rp. 5.000.000 (10 bulan)
- a. Tabung gas sebesar Rp. 1.777.625,000, atau  
Rp. 765,261 per kg pada Desember 2019.
- b. Depresiasi sebesar Rp. 5.967.120,000, atau  
sebesar 87,50% dari harga Desember 2019.
- c. Kredit yang diberikan sebesar Rp.  
16.749.267,000, atau 77,00% dari harga  
Desember 2019.
  - 1. Di kredit kantor cabang ...  
awal tahun April 2020 ke akhir 2020  
sebesar Rp. 163.324,000
  - 2. Di awal kredit pada ...  
akhir April 2020 ke akhir Mei 2020  
sebesar Rp. 16.277,000
- d. Total pembayaran sebesar Rp.  
1.710.110,000, atau 66,55% dari harga  
akhir Desember 2019.
- e. Biaya sebesar Rp. 2.405.803,000, sebesar  
41,22% dari harga akhir Desember 2019.
- f. Biaya listrik sebesar Rp. 5.000.000, atau  
sebesar 23,30% dari harga akhir  
Desember 2019.
- g. KPI sebesar 2,50% lebih dari harga  
5,97%
- h. OAR sebesar 39,22% lebih dari harga  
1,9%
- i. Ungkapan ekspansi yang akan dicapai  
Aksi telah dicapai kreditannya yang  
sisa Rp. 0,00 di akhir tahun sebesar Rp.  
16.749.267,000, dan dari ...  
akhir sebesar Rp. 570.000,000.
- j. Menunjukkan rekayasa ...  
kepada ...
- k. Aksi mengupayakan ...  
untuk ... yang ...  
tanggung yang ...  
kecuali pada 30 Juni 2020 ...  
pemerintah ...

4. Akan melakukan penelitian pada  
tanggal Sabtu, 27 Juni 2020, dan akan  
ke samping

2. Fenitoin dan fenobarbital  
pada kejang

3. Terdapat nasal tersebut ini
4. terjadi kejang yang akan diketahui
1. melakukan studi untuk mengetahui  
efektivitas yang melakukan tersebut  
terhadap kejang pada BM
  2. mengetahui terhadap kejang tersebut

Rapat ditulis pada tanggal 20/06/20



ABRAM MEO P.S  
Ketua Rapat



Ana Saqala  
Ketua

NOTIFIKASI RAPAT PENGURUS BULAN JULI 2020  
PT. BPR Nusantara Banté Pasogit 12

Tanggal : 23 Juli 2020, di ruang rapat kantor pusat

**Peserta Rapat:**

Ayudha Padoha : Sekretaris Utama  
Wirasna : Manajer  
Kusy Satrio Nugroho : Manajer  
Leo : Kepala Cabang  
Ayo Fatmahanik : Kepala Cabang  
Ayo Firdausy : Staf Administrasi

**Agenda Rapat:**

1. Pembahasan mengenai agenda bulanan Juli 2020
2. Pembahasan mengenai perkembangan Juli 2020
3. Pembahasan mengenai agenda bulanan Juli 2020

Rapat dimulai pada pukul : 11.30 WIB

Rapat dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Wirasna

**Keputusan Rapat:**

1. Pembahasan mengenai  
kegiatan pemasaran dan  
pembangunan rumah yang  
dihadirkan BPK NSM D
2. Disetujui Yusuf Luchman:
  1. Akan membeli kendaraan MPV 15 Seater untuk mendukung penyaluran ke 15 rumah di Kalimantan sehingga Rp. 350.000.000,- sesuai dengan jadwal rapat anggaran indikasi di bulan Agustus 2020 dan pembelian kendaraan menunggu pencairan akad kredit
  2. Anggaran 1 (satu) unit mobil di Kalimantan dengan biaya sebesar Rp. 600.000.000 akan tetap di kasubank karena tidak keajaiban dengan agen property.
3. Disetujui Ayo Fatmahanik:
  1. Terakutalakan penyelesaian cash dengan Ayo Fatmahanik dengan dana di bank apabila kebutuhan sebesar Rp. 100.000.000,- dan Rp. 200.000.000,- ke bank syariah
  2. Ayo Firdausy dan Ayo Fatah akan

ditentukan untuk dan di bawah  
perintah yang dan perintah untuk  
A. Kalkulasi : suatu konsep  
keterampilan yang berbeda

c. Jenis dan sifat fungsi

1. Ayo menulis seperti buku atau  
alat pendukung lainnya (PK)
2. Ayo menulis sendiri dan di  
antar Mata. Contoh :  
A. B. untuk memahami kemampuan  
atau kemampuan dan identitas  
gelombang lainnya.
3. Menulis dan was untuk dapat  
menghasilkan bentuk proses dan  
nama
4. Ayo tulis, memahami proses dan  
usaha Kevra mendidik

d. Belajar dan belajar kemudian

1. Belajar dan proses belajar dan  
KIP guna melengkapi pemahaman  
yang dan belajar dan memahami dan  
keterampilan dan pemahaman  
yang berbeda

e. Belajar dan belajar

1. Ayo menulis seperti proses dan  
penerapan dengan belajar dan belajar  
di, B. dan belajar dan belajar
2. Belajar dan belajar dan belajar dan  
dan belajar dan belajar dan belajar  
dan belajar dan belajar dan belajar  
dan belajar dan belajar dan belajar

f. Belajar dan belajar kemudian

1. Belajar dan belajar dan belajar dan  
dan belajar dan belajar dan belajar  
dan belajar dan belajar dan belajar  
dan belajar dan belajar dan belajar  
dan belajar dan belajar dan belajar

g. Belajar dan belajar

1. Belajar dan belajar dan belajar dan  
dan belajar dan belajar dan belajar  
dan belajar dan belajar dan belajar  
dan belajar dan belajar dan belajar
2. Belajar dan belajar dan belajar dan  
dan belajar dan belajar dan belajar

1

3. Rasio "Jawaban" terhadap pertanyaan  
criminal dengan LPPN lebih sedikit  
dari, PT. Ewara Asuransi Syariah

4. Fokus penyelesaian kePR-DFP

1. Inisiatif

2. Pro-aktif

3. Bertanggung jawab

4. Berkomunikasi

5. Fleksibel

6. Berdaya

7. Inovatif

2. Perencanaan keuangan  
perusahaan yang  
merencanakan  
perencanaan

a. Perencanaan sebesar Rp. 8.245.000.000,00 atau  
95,90% dari target bulan Desember 2020

b. Perencanaan sebesar Rp. 8.925.000.000,00 atau  
sebesar 100% dari target Desember 2020

c. Kredit yang dibutuhkan sebesar Rp.  
14.238.760.000,00 atau 98,07% dari target  
Desember 2020

d. Total pendapatan sebesar Rp.

3. 21.000.000,00 atau 45,10% dari target  
bulan Desember 2020

e. Biaya sebesar Rp. 144.000.000,00 dengan  
10,47% dari target bulan Desember 2020

f. LBI sebesar Rp. 1.445.750.000,00 atau  
sebesar 14,02% dari target bulan  
Desember 2020

g. LPPN sebesar 5,78% lebih dari target  
8,44%

h. OAR sebesar 38,68% lebih dari target  
35,90%

i. Kegiatan yang dilakukan

1. Melakukan audit keuangan dengan  
Pusat yang ada di lingkungan perusahaan  
tersebut.

2. Mengingat biaya tersebut akan di  
SPF NBP dan C. C. C.

3. Fokus meningkatkan kredit sebagai  
pemerintah

4. Kerja sama dengan pemerintah  
pemerintah sebagai salah satu  
sumber dana.

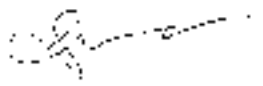
10

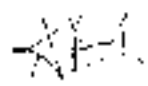


1. Penyerahan " " kepada  
Instansi C

- a. " " dan " " "
- b. " " " " " " " "
- c. " " " " " " " "
- d. " " " " " " " "

2. " " " " " " " " " " " "

  
ABRAHAM THEG P.S  
Gubernur

  
Anjo Budi Setiawan  
Gubernur

## NOTULEN RAPAT KOMISARIS BULAN JULI 2020

P1. BPR Nusantara Bona Pasagit 12

Tanggal: 28 Agustus 2020, di ruang rapat kantor pusat

### Partesipasi Rapat:

Agung Nugroho	Manajemen Umum
Wahyuni	Manajemen Umum
Dr. J. Karyadi MS	Direktur
Agus Pratomo	Manajemen Umum
Leo	Manajemen Umum
Alvin	Manajemen Umum

### Agenda Rapat:

1. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
2. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
3. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
4. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
5. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
6. Pembacaan agenda rapat bulan Juli

Rapat dimulai pada pukul 10.15 WIB

Rapat dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Wahyuni

### Keputusan Rapat

1. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
2. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
3. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
4. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
5. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
6. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
7. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
8. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
9. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
10. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
11. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
12. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
13. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
14. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
15. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
16. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
17. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
18. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
19. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
20. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
21. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
22. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
23. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
24. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
25. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
26. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
27. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
28. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
29. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
30. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
31. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
32. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
33. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
34. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
35. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
36. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
37. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
38. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
39. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
40. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
41. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
42. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
43. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
44. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
45. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
46. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
47. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
48. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
49. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
50. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
51. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
52. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
53. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
54. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
55. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
56. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
57. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
58. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
59. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
60. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
61. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
62. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
63. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
64. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
65. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
66. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
67. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
68. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
69. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
70. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
71. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
72. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
73. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
74. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
75. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
76. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
77. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
78. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
79. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
80. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
81. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
82. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
83. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
84. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
85. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
86. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
87. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
88. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
89. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
90. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
91. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
92. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
93. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
94. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
95. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
96. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
97. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
98. Pembacaan agenda rapat bulan Juli
99. Pembacaan surat dan surat dari pejabat terkait
100. Pembacaan agenda rapat bulan Juli

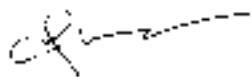
Agus Pratomo





2. Tanggung jawab yang harus dipegang
3. Tanggung jawab dalam melaksanakan Perintah Allah
1. Agar tidak takut dengan perintah Allah yang ada di dalam Alkitab
  2. Agar dipaparkan dengan sukarela perintah Allah yang ada di dalam Alkitab dengan lantang dan tidak takut Allah
4. Tanggung jawab dalam menghadapi ayat
1. Agar memahami ayat Alkitab dengan mengawak, dan mengawak dengan Alkitab dengan Deuterium 2:18. Hal ini akan membantu setiap orang yang menghadapi perintah Allah dengan ayat 18
  2. Liberal Liberty dan demokrasi

5. Waktu dan tempat pelaksanaan



**ABRAHAM THED P.S**  
Guru Besar



**Ario Sagala**  
Nanda

## NOTULEN RAPAT KOMISARIS BULAN AGUSTUS 2020

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 12

Tanggal : 18 September 2020, di ruang rapat kantor pusat

### Peserta Rapat :

Ayo Guruh Nugroho Aji	Manisari, Jurnani
Winanda	Manisari
Rudy Bodewyn M1	Dickky
Jalija Komada	Nidena, Kadir
Joni	Krisna Cahyani
Amal Saputra	Fitri, Keparulian

### Agenda Rapat :

1. Pembacaan dan pembahasan laporan keuangan triwulanan
2. Pembahasan laporan keuangan yang akan diumumkan
3. Pembacaan dan pembahasan laporan keuangan
4. Pembahasan mengenai perkembangan usaha selama bulan Agustus 2020
5. Pembacaan dan pembahasan laporan keuangan triwulanan periode Mei, Juni dan Juli 2020

Rapat dimulai pada pukul : 12.15 WIB

Rapat dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Rudy Bodewyn M1

### Keputusan Rapat

1. Menyetujui hasil-hasil rapat
2. Keputusan Rapat PT  
Nugroho, Guruh, Appriadi, Didi, Satrio, Winanda, Jurnani, Manisari, Rudy Bodewyn M1, Dickky, Komada, Jalija, Nidena, Kadir, Krisna Cahyani, Fitri, Keparulian, Amal Saputra, dan yang hadir pada rapat tersebut. Revisi dan koreksi tidak

- terhadap kapal (K 91, N 91) dan akan  
mendapat paket bendaharaga dengan  
KPRM yang sama termasuk K 91 dan  
KPRM yang terdapat pada K 91/1111
1. Syarifuddin adalah berstatus 120 x 100  
dengan nilai Rp. 400.000.000, 5 x 100  
Rp. 200.000.000 dan lain-lain, dan  
nilai Rp. 200.000.000 dan lain-lain  
jumlah dan akan dibayar oleh  
negara swasta pada perusahaan  
perusahaan dan akan dibayar oleh  
negara dan akan dibayar oleh  
negara
  2. Dan akan dipotong untuk kepentingan  
negara ke 200.000.000 (dua  
ratus juta) dan akan dibayar oleh  
negara untuk kepentingan 200.000  
juta
  3. Rasio antara lain sebagai berikut  
prosedur yang akan dilakukan untuk  
negara dibayar oleh negara ke 200  
juta dan lain-lain, dan lain-lain  
dibayar oleh negara
  4. Dan akan dibayar oleh negara ke 200  
juta dan lain-lain, dan lain-lain  
negara ke 200.000.000
  5. Dan akan dibayar oleh negara ke 200  
juta dan lain-lain, dan lain-lain  
negara ke 200.000.000
  6. Dan akan dibayar oleh negara ke 200  
juta dan lain-lain, dan lain-lain  
negara ke 200.000.000
  7. Dan akan dibayar oleh negara ke 200  
juta dan lain-lain, dan lain-lain  
negara ke 200.000.000

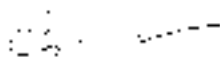
	<p>2. Apa itu proses pembentukan koin dan piala dengan diameter 2,00?</p> <p>3. Keunggulan Binar Pemadatan Koin</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>2. Tidak memerlukan waktu lama</li> <li>3. Dapat digunakan untuk koin lain</li> <li>4. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>5. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>6. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>7. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>8. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>9. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>10. Tidak memerlukan pemadatan</li> </ol>
<p>4. Keuntungan dan kerugian dari koin</p>	<p>d. Tidak memerlukan pemadatan</p> <p>5. Keuntungan dan kerugian dari koin</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>2. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>3. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>4. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>5. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>6. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>7. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>8. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>9. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>10. Tidak memerlukan pemadatan</li> </ol>
<p>5. Keuntungan dan kerugian dari koin</p>	<p>6. Keuntungan dan kerugian dari koin</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>2. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>3. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>4. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>5. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>6. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>7. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>8. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>9. Tidak memerlukan pemadatan</li> <li>10. Tidak memerlukan pemadatan</li> </ol>



<p>3. Pengumuman          dan mutasi, dan          mutasi dan mutasi          2020.</p>	<p>Peringkat          dan          Agustus          2020.</p>	<p>a. ...          b. ...          c. ...          d. ...          e. ...          f. ...          g. ...          h. ...          i. ...          j. ...          k. ...          l. ...          m. ...          n. ...          o. ...          p. ...          q. ...          r. ...          s. ...          t. ...          u. ...          v. ...          w. ...          x. ...          y. ...          z. ...</p>
<p>4. ...          dan ...          dan ...          dan ...</p>	<p>Peringkat          dan ...          dan ...          dan ...</p>	<p>a. ...          b. ...          c. ...          d. ...          e. ...          f. ...          g. ...          h. ...          i. ...          j. ...          k. ...          l. ...          m. ...          n. ...          o. ...          p. ...          q. ...          r. ...          s. ...          t. ...          u. ...          v. ...          w. ...          x. ...          y. ...          z. ...</p>

4. Berapa biaya per kandidat? 1000  
apakah ada kemas kaji mengenai ini?  
Ditanyakan bagaimana? NCI dan lain-lain

jumlah dan biaya produksi? 11.95



ABRAHAM THEO P.S  
Kris. Sengul



Eric Sengul  
Nouls

**NOTULEN RAPAT KOMISARIS MENGENAI PERKEMBANGAN USAHA  
BULAN NOVEMBER 2020**

**PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 12**

**Tanggal : 22 Desember 2020, melalui daring google meet**

**Peserta Rapat :**

Abraman, Itha P.S : Komisaris Utama  
Wirasno : Komisaris  
Rudy Bodewyn M.I : Direktur  
Ananilya : General Manager  
Gaya Rasmada : Internal Audit  
Idrus Afandi : Kepala Bagian Marketing  
Arta Sagara : PE Kepala Unit

**Agenda Rapat :**

1. Pembahasan Mengenai Hasil Perkembangan Usaha bulan November
2. Langkah-langkah yang akan dilakukan
3. Hasil Temuan IC
4. Laporan PE Kepala Unit, Manajemen Risiko & APU PPT

**Rapat dimulai pada pukul : 13.50 WIB**

**Rapat dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Wirasno**

**Keputusan Rapat :**

1	Kinerja perkembangan usaha bulan November 2020	a. Tabungan sebesar Rp. 9.234.766.000,- atau sebesar 108% b. Deposito sebesar Rp. 8.410.100.000,- atau sebesar 100% c. Kredit yang diberikan sebesar Rp. 14.709.498.000,- atau sebesar 87%
---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pendapatan sebesar 5.072.233.000 atau sebesar 71%</li> <li>e. Total biaya sebesar Rp. 5.615.596.000, atau sebesar 84%</li> <li>f. EBT sebesar (Rp. 543.363,-) atau - 117%</li> <li>g. PAR sebesar 27,13%</li> <li>h. NPL sebesar 15,94%</li> </ul>
2	Langkah-langkah yang akan dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi modal ini pada tahun 2021 melalui pertumbuhan laba</li> <li>b. Debitur Haliz Fatmahanman: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Debitur telah menerima angsuran dari pengadialan dengan jadwal 29 Desember 2020 namun debitur tidak dapat hadir dikarenakan istri debitur akan melahirkan dan memohon membayar sebesar Rp. 50 juta</li> <li>2. Proses angsuran tetap berjalan agar debitur dapat menyelesaikan segala kewajibannya</li> </ul> </li> <li>c. Fokus kepada Kredit KKM, Prima dan Anuitas pada tahun 2021</li> </ul>
3	Hasil Temuan IC	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat 2 berkas kredit debitur an. Ornan dan Sulisna yang tidak ditemukan maka FH IC diminta memberikan batas waktu kepada Admin kredit untuk segera menemukan berkas tersebut</li> <li>b. Drencanakan berkas debitur kredit untuk di scan untuk mengurangi kelalaian dalam menyipon berkas</li> </ul>
4	PF Kepatuhan dan Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam rangka untuk mencapai rencana kerja di tahun 2021 dibutuhkan strategi yang tepat untuk itu PF Kepatuhan diminta untuk Membeah profil risiko</li> </ul>

tersebut agar memperlakukan kajian  
mengenai risiko kredit.

Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB

dlo

ABRAHAM THEO P.S  
Ketua Rapat



Arta Sagala  
Koordinator

**NOTULEN RAPAT KOMISARIS MENGENAI PERKEMBANGAN USAHA  
BULAN DESEMBER 2020**

**PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 12**

**Tanggal : 21 Januari 2021, melalui daring google meet**

**Peserta Rapat :**

Abraham Theo P.S : Komisaris Utama  
Wirasno : Komisaris  
Rudy Bastiawyn M.T : Direktur  
Ananditya : General Manager  
Liya Rosmaida : Internal Audit  
Ara Sagala : FF Kepatuhan  
Leo : Kepala Cabang

**Agenda Rapat :**

1. Pembahasan Mengenai pengajuan calon direksi an, Ananditya
2. Kebijakan kebijakan yang akan dilakukan tahun 2021 untuk mencapai target tahun 2021
3. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target 2021

**Rapat dimulai pada pukul : 08.30 WIB**

**Rapat dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Wirasno**

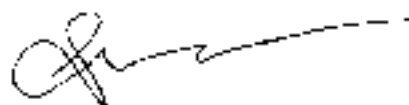
**Keputusan Rapat :**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Pembahasan Mengenai pengajuan calon direksi an, Ananditya | a. Terdapat kekurangan dokumen yaitu ijin terakhir yang dilegalisir oleh institusi yang bersangkutan (jajah legalisir dari Institut sepuluh Nopember Surabaya). karena adanya lockdown dari pihak (Institut sepuluh Nopember Surabaya) dari tanggal 25 Desember 2020 s/d 11 Januari 2021. |
|--|---|



		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Akan diupayakan dokumen dapat diterbitkan paling lambat 30 Januari 2021</li> </ul>
2	<p>Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan tahun 2021 untuk mencapai target RBB</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akan disosialisasikan SK tentang insentif dan Punishment dimana punishment bagi AC Lending dan Remedial apabila tidak mencapai target akan dilakukan pemotongan terhadap gaji karyawan tersebut</li> <li>b. Akan disosialisasikan SK Direksi tersebut pada acara kick off 21 Januari 2021</li> <li>c. Dalam rangka sosialisasi ditampilkan persentase perbedaan antara SK lama dan SK yang baru</li> <li>d. Akan dilakukan evaluasi terhadap SK Direksi setelah pemberlakuan dalam jangka waktu 3 bulan</li> </ul>
3	<p>Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala cabang akan meningkatkan Outstanding dana pihak ketiga untuk mengurangi ketertanggung-kepada RAK pusat</li> <li>b. Mengupayakan Penyelesaian kredit bermasalah (NPL) sebesar Rp. 215.000.000,- per Januari 2021</li> <li>c. Melakukan evaluasi strategi pada tahun pertama apabila tidak mencapai target maka akan dilakukan perubahan strategi</li> </ul>

Rapat ditutup pada pukul 12.30 WIB



**ABRAHAM THEO P.S**  
Ketua Rapat



**Arta Sagala**  
Notulis

**NOTULEN RAPAT KOMISARIS MENGENAI PERKEMBANGAN USAHA  
BULAN JANUARI 2021**

**PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 12**

**Tanggal : 25 Februari 2021, melalui daring ZOOM**

**Peserta Rapat :**

Abrahami Thea P.S : Komisaris Utama  
Wirasno : Komisaris  
Rudy Bodewyn M.T : Direktur  
Andanitya : General Manager  
Lilya Rosmida : Internal Audit  
Idrus Afandi : PF Kepatuhan  
Leo : Kepala Cabang

**Agenda Rapat :**

1. Pembahasan Mengenai pengajuan calon direktur an. Ananditya
2. Pembahasan Mengenai pengajuan calon direktur utama an Rudy Bodewyn Mangasa Tua
3. Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan tahun 2021 untuk mencapai target tahun 2021
4. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target 2021
5. Kinerja perkembangan usaha bulan Januari 2021
6. Hasil Temuan IC

**Rapat dimulai pada pukul : 10.55 WIB**

**Rapat dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Wirasno**

**Keputusan Rapat :**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Pembahasan Mengenai pengajuan calon direktur an. Ananditya | a. Sudah diingkapi kekurangan dokumen yaitu, Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh |
|---|--|



		<p>Institusi yang bersangkutan (ijazah legalis dari Institut sepuh Nopember Surabaya);</p> <p>b. terdapat kekurangan dokumen yaitu: Daftar riwayat hidup yang belum mencantumkan tanggal, Pas Foto 4x6. Daftar lisan belum sesuai SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 belum mencantumkan tanggal. Surat pernyataan komitmen belum lengkap. Struktur Organisasi dan uraian jabatan.</p> <p>Sudah di laporkan kembali ke OJK pada tanggal 23 Februari 2021</p>
2	Pembahasan Merigendi pengajuan calon direktur utama an Rudy Bodewyn Mangasa Teo	<p>BPR menerima surat dari Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor S-61/KR.011/2021 pada tanggal 22 februari 2021 Perihal Proses Pencalonan Direktur Utama an Rudy Bodewyn M T yang menerangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman pencalonan Direktur Utama akan di proses dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat Merigundang calon direktur utama an Rudy Bodewyn M T pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 09:30 sd selesai melalui video conference.</li> </ul>
3	Kebijakan kebijakan yang akan dilakukan tahun 2021 untuk mencapai target RRR	<p>a. Sudah disosialisasikan SK tentang Insentif dan Punishment dimana punishment bagi AC Lending dan Remedial apabila tidak mencapai target akan dilakukan pemotongan terhadap gaji karyawan tersebut pada tanggal 23 Januari 2021.</p>

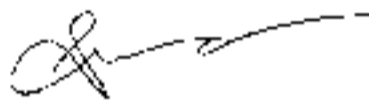
*[Handwritten signature]*

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Akan dilakukan evaluasi terhadap SK Direksi setelah pemberlakuan dalam jangka waktu 3 bulan</li> </ul>
4	Langkah-langkah yang akan dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan evaluasi strategi pada triwulan pertama apabila tidak mencapai target maka akan dilakukan perubahan strategi</li> <li>b. Target NPL untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.900.000.000,- sehingga target pengurangan perbulan sebesar Rp. 190.000.000</li> <li>c. Fokus kepada Kredit KKM dan Kredit Prima Kredit prima sudah 26 rekening 49 juta.</li> <li>d. Kredit bermasalah an Hafiz Faturrahman, sudah proses ke pengadilan untuk mendalatkan sista eksekusi.</li> <li>e. Kantor Cabang akan membuat laporan bulanan neraca laba rugi yang sesuai format perkembangan usaha.</li> <li>f. Karyawan yang mengundurkan diri an Agustinus Wahyu Gunawan sedang dilakukan verifikasi oleh infomasi audit.</li> </ul>
5	Kinerja perkembangan usaha bulan Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tabungan sebesar Rp. 9.593.397.000,- atau sebesar 104%</li> <li>b. Deposita sebesar Rp 8.478.100.000 atau sebesar 102%</li> <li>c. Kredit yang diberikan sebesar Rp. 14.506.315.000,- atau sebesar 78%</li> <li>d. Pendapatan sebesar 445.134.000 atau sebesar 6%</li> <li>e. Total biaya sebesar Rp 432.448.000,- atau sebesar 7%</li> <li>f. EBT sebesar Rp. 12.686.000,- atau 2%</li> <li>g. PAR sebesar 32,00%</li> </ul>

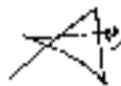
hw

6	Hasil forum IC	<p>h. NPL sebesar 17,84%:</p> <p>a. Kredit prima an wiwin wiwaty debitur menunggak, rumah yang disavel atau ditempat adalah milik adiknya, sudah pindah 1 tahun yang lalu. Ingin membayar angsuran tidak bisa menghubungi petugas dan debitur terpapar covid-19. Saat pendaftaran suami atau pendamping tidak ikut serta sehingga suami tidak mengetahui bahwa debitur meminjam.</p> <p>b. Kredit Umum an Sari Kumiasih debitur menunggak, jaminan bukan milik debitur, melainkan tetangga atau teman, debitur usaha jual produk herbal. Dan rumah mengontrak, ada perdebatan pemilik jaminan terjadi ketika jaminan kendaraan tersebut akan di amankan oleh pihak BPR, namun dapat terselesaikan dengan mufakat.</p>
---	----------------	---

Rapat di tutup pada pukul 14:30 WIB



**ABRAHAM THEO P.S**  
Ketua Rapat



**Igus Afandi**  
Notulis

**NOTULEN RAPAT KOMISARIS MENGENAI PERKEMBANGAN USAHA  
BULAN FEBRUARI 2021**

**PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 12**  
Tanggal : 23 Maret 2021, melalui daring ZOOM

**Peserta Rapat :**

Abraham Theo P.S : Komisaris Utama  
Wirasno : Komisaris  
Rudy Bodewyn M.F : Direktur  
Ananditya : General Manager  
Hidya Rosmaida : Internal Audit  
Idrus Afandi : PR Kepatuhan

**Agenda Rapat :**

1. Pembahasan Mengenai pengajuan calon direktur an, Ananditya
2. Pembahasan Mengenai pengajuan calon direktur utama an Rudy Bodewyn Mangasa Iuda
3. Kebijakan kebijakan yang akan dilakukan tahun 2021, untuk mencapai target tahun 2021
4. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target 2021
5. Kinerja perkembangan usaha bulan Februari 2021
6. Hasil Temuan IC

**Rapat dimulai pada pukul : 09.50 WIB**

**Rapat dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Abraham Theo P.S**

**Keputusan Rapat :**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Pembahasan Mengenai pengajuan calon direktur an, Ananditya | a. Sudah dilengkapi kekurangan dokumen yaitu ijazah terakhir yang dilegalisir oleh institusi yang bersangkutan (ijazah legalisir dari Institut sepuluh Nopember Surabaya) |
|---|---|



	<p>b. Terdapat kekurangan dokumen yaitu, Daftar riwayat hidup yang belum mencantumkan tanggal, Pas Foto 4x6, Daftar kisan belum sesuai SLQJK No. 39/SEOJK/03/2016 belum mencantumkan tanggal, Surat pernyataan komitmen belum lengkap, Struktur Organisasi dan uraian jabatan.</p> <p>Sudah di laporkan kembali ke GUK pada tanggal</p> <p>c. Sudah dilakukan PPK tanggal 15 Maret 2021 oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menunggu hasil dari Otoritas Jasa Keuangan</p>
<p>2. Pembahasan Mengenai pengajuan calon direktur utama on Rudy Badewyn Mangasa Tua</p>	<p>BPR menerima surat dari Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor S-61/KR.011/2021 pada tanggal 22 februari 2021 Perha: Proses Pencalonan Direktur Utama on Rudy Badewyn MT yang menerangkan .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan pencalonan Direktur Utama akan di proses dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat.</li> <li>- Mengundang calon direktur utama on Rudy Badewyn M T pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 09:30 se selesai melalui video conference.</li> </ul> <p>Sudah dilakukan PPK pada tanggal 2 Maret 2021 oleh otoritas jasa keuangan. Hasil keputusan atas pencalonan Direktur Utama on Rudy Badewyn M T dengan surat nomor SR-39/KR.011/2021 tanggal 12 Maret 2021 bahwa dewan komisiner Otoritas Jasa</p>



		<p>Keuangan tidak menyetujui sebagai Calon Direktur Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat diajukan kembali untuk bidang jabatan yang sama paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui</li> </ul>
3	Langkah-langkah yang akan dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan evaluasi strategi pada triwulan pertama apabila tidak mencapai target maka akan dilakukan perubahan strategi dengan menggunakan OKR.</li> <li>b. Target NPI untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.900.000.000, sehingga target penagihan perbulan sebesar Rp 190.000.000</li> <li>c. Action Plan Debitur inti NPI             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ngafiman (untuk diajukan lelang)</li> <li>2. Hafizaturrahman (proses pengadilan)</li> <li>3. Irwin</li> <li>4. Sarin (penjualan rumah melalui proses KPR)</li> <li>5. Nina Ekawati (janji bayar bulan ini)</li> <li>6. Rika Adani (janji bayar bulan ini)</li> <li>7. Syafei (Lelang swasta)</li> <li>8. Muhammad Bandan Hermawa Agar dimasukkan debitur NPL yang akan di proses oleh Bantuan Lembaga Hukum</li> </ul> </li> <li>d. Akan dilakukan proses kerjasama dengan Bank Mandiri perihal system QRIS, EDC dan MCM</li> <li>e. Aidi Gunawan akan direncanakan pelunasan sebagian dan kemudian akan</li> </ul>

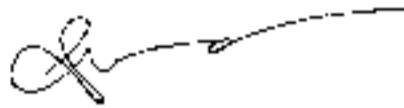
*[Handwritten signature]*

		<p>dilakukan restrukturisasi FOJK 33/POJK.03/2018</p> <p>Perkait dengan tagihan pelunasan KAP, dimana dari pihak KAP dapat mengirimkan hardcopy buku AUDIT KAP tahun 2020 apabila sudah membayar pelunasan. Untuk itu agar dilakukan pembayaran pelunasan.</p>
4	Kinerja perkembangan usaha bulan Februari 2021	<p>a. Tabungan sebesar Rp. 9.291.072.000,- atau sebesar 101%</p> <p>b. Deposita sebesar Rp. 8.093.100.000,- atau sebesar 97%</p> <p>c. Kredit yang diurikan sebesar Rp. 14.999.852.000,- atau sebesar 81%</p> <p>d. Pendapatan sebesar 887.056.000 atau sebesar 12%</p> <p>e. Total biaya sebesar Rp. 866.364.000,- atau sebesar 13%</p> <p>f. EBI sebesar Rp. 20.692.000,- atau 3%</p> <p>g. PAR sebesar 30,92%</p> <p>h. NPL sebesar 17,27%</p>
5	Hasil Temuan IC	<p>a. Kredit prima an wwin widiaty debitur menunggak, rumah yang disurvei atau ditempati adalah milik adiknya, sudah pindah 7 tahun yang lalu. Ingin membayar angsuran tidak bisa menghubungi petugas dan debitur terpapar covid-19. Saat bercerai suami atau pendamping tidak ikut serta sehingga suami tidak mengetahui bahwa debitur menunggak.</p> <p>b. Kredit Umum an Sat Kurnasih debitur menunggak, jaminan bukan milik debitur.</p>

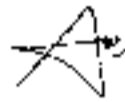
4

melewatkan tetangga atau teman. debitur usaha jual produk herbal. Dan rumah mengontrak, ada perdebatan pemilik jaminan terjadi ketika jaminan kendaraan tersebut akan di amankan oleh pihak SPR, namun dapat terselesaikan dengan mutakat.

Rapat ditutup pada pukul 14.03 WIB



**ABRAHAM THEO P.S**  
Ketua Rapat



**Idrus Atandj**  
Notulis



**NOTULEN RAPAT KOMISARIS MENGENAI PERKEMBANGAN USAHA  
BULAN MARET 2021**

**PT. BPR Nusantara Bona Pasagi 12**  
Tanggal : 14 April 2021, melalui daring ZOOM

**Peserta Rapat :**

Abraham Theo P.S : Komisaris Utama  
Wirasno : Komisaris  
Rudy Sodewyn M.T : Direktur  
Ananditya : General Manager  
Leo : Kepala Cabang  
Hidya Rosmaida : Internal Audit  
Adius Afandi : PE Kepatuhan

**Agenda Rapat :**

1. Pembahasan mengenai pengajuan calon direktur an, Ananditya
2. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target 2021
3. Kinerja perkembangan usaha bulan Maret 2021
4. Hasil Temuan IC

**Rapat dimulai pada pukul : 09.50 WIB**

**Rapat dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Abraham Theo P.S**

**Keputusan Rapat :**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Pembahasan mengenai pengajuan calon direktur an, Ananditya | a. Sudah dilakukan PCK tanggal 15 Maret 2021 oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menunggu hasil dari Otoritas Jasa Keuangan.<br>b. Hasil PCK<br>c. Menunggu informasi dari PT NBP terkait kelanjutan pengajuan calon Direktur |
|---|--|---|

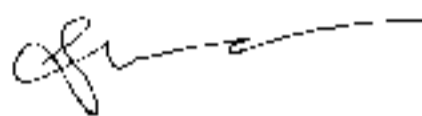
*Handwritten signature*

<p>2</p> <p>Langkah-langkah yang akan dilakukan</p>	<p>a. Target NPL untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.900.000.000, sehingga target penagihan perbulan sebesar Rp 190.000.000</p> <p>b. Action Plan Debitur inli NPL</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hafiz Fatmahan (proses pengadilan dalam sifa eksekusi)</li> </ol> <p>c. Debitur NPL yang akan Lunas Bujur April</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nina Ekawati Rp 37.500.000</li> <li>2. Uhar SuhardE 66.600.000</li> <li>3. Muhammad Rudi Rp 18.200.000</li> </ol> <p>d. Akan dilakukan proses kerjasama dengan Bank Mandiri perihal system QRIS, EDC dalam proses pengiriman mesin dan MCM sudah disertai dan bisa digunakan</p> <p>e. Untuk kredit wa agar diinventarisir dan dilakukan penagihan</p> <p>f. Akan dilakukan perubahan SKDIREKSI Komite Kredit yang menambahkan admin kredit sebagai tim komite.</p>
<p>4</p> <p>Kinerja perkembangan usaha bulan Maret 2021</p>	<p>a. Tabungan sebesar Rp. 8.581.284.000 - atau sebesar 97%</p> <p>b. Deposito sebesar Rp. 8.493.100.000,- atau sebesar 102%</p> <p>c. Kredit yang diberikan sebesar Rp 15.175.035.000, atau sebesar 82%</p> <p>d. Pendapatan sebesar 1.321.382.000 atau sebesar 18%</p> <p>e. Total biaya sebesar Rp. 1.328.282.000,- atau sebesar 20%</p> <p>f. LBI sebesar Rp. 6.900.000,- atau -1%</p> <p>g. PAR sebesar 29.58%</p>

*Handwritten signature*

		c. NP <sub>2</sub> sebesar 17,08%
3	Hasil Temuan IC	a. Hasil pemeriksaan kredit yang dihapus buku (Write Off) b. Pemeriksaan terhadap agustinus wahyu gunawan

Rapat ditutup pada pukul 17.30 W-3



**ABRAHAM THEO P.S**  
Ketua Rapat



**Idrus Afandi**  
Notulis

# NOTULEN RAPAT KOMISARIS MENGENAI PERKEMBANGAN USAHA

BULAN APRIL 2021

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 12

Tanggal : 24 Mei 2021

## Peserta Rapat :

Abraham Theo P.S : Komisaris Utama  
Wirasno : Komisaris  
Rudy Badewyn M.T : Direktur  
Leo : Kepala Cabang  
Fidya Rosmaida : Internal Audit  
Idrus Atandi : PE Kepatuhan

## Agenda Rapat :

1. Pembahasan Mengenai pengajuan calon direktur an, Ananditya
2. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target 2021
3. Kinerja perkembangan usaha bulan April 2021
4. Hasil Temuan IC

Rapat dimulai pada pukul : 09.50 WIB

Rapat dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Abraham Theo P.S

## Keputusan Rapat :

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Pembahasan Mengenai pengajuan calon direktur | a. Berdasarkan hasil fit and proper test dari otoritas jasa keuangan selaku calon anggota Direksi PT BPR NBP 12 bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Direksi PT BPR NBP 12. BPR NBP 12 telah menerima surat dari PT NBP perihal Calon Direktur an Ananditya tanggal 26 April 2021. |
|---|--|--|

	b. Calon Direktur sedang dalam proses penyelesaian
7. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mencapai target 2021	<p>a. Target NPL untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.900.000.000, sehingga target penagihan perbukar sebesar Rp. 190.000.000</p> <p>b. Debitur NPL yang akan Lunas Bulan Mei</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nina Ekawati Rp 37.500.000</li> <li>2. Mayati Rp 37.588.000</li> <li>3. Erwin Rp 233.332.500 juta</li> <li>4. Uhar Suhardi Rp 66.666.400</li> <li>5. Muzadilah Masitah Rp 7.498.600</li> <li>6. Rendy Aya Putra Rp 7.001.000</li> <li>7. Muhammad Rifqi Rp 4.192.000</li> <li>8. Dede Yusuf Rp 3.750.000</li> <li>9. Rajai Rp 2.050.000</li> <li>10. Wiwin Widiyanti Rp 1.730.000</li> <li>11. Anita Rohmatul Jarriah Rp 994.700</li> <li>12. Abul Rp 6.138.800</li> <li>13. Ratna Julita Rp 344.200</li> <li>14. Deni Susilo Rp 416.300</li> </ol> <p>OS penurunan NPL yang ditargetkan sebesar RP 379.456.000,- dengan penurunan tersebut maka outstanding NPL di bulan Mei 2021 sebesar Rp. 2.191.713.227,-</p> <p>c. Atas nama Aguslinus Wahyu Gunawan menunggu 2 bulan setelah diberikan surat kepada ybs, maka akan di upayakan secara kekeluargaan terkait tanggung jawab kerugian BPR dan jika tidak bertanggung jawab akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.</p> <p>d. Perihal pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Baptek Wirasno dan Pengangkatan anggota Dewan</p>

*[Handwritten signature]*

		Komisaris dan Hendrawan Agus akan diselenggarakan RUPS secara daring pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 pukul 14:00.
3	Kinerja perkembangan usaha bulan April 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tabungan sebesar Rp. 8.020.584.000,- atau sebesar 87%</li> <li>b. Deposito sebesar Rp. 8.414.800.000,- atau sebesar 101%</li> <li>c. Kredit yang diberikan sebesar Rp. 15.396.740.000,- atau sebesar 94%</li> <li>d. Pendapatan sebesar 1.903.047.000 atau sebesar 26%</li> <li>e. Total biaya sebesar Rp. 1.557.460.000, atau sebesar 28%</li> <li>f. EBT sebesar Rp. 45.587.000,- atau 6%</li> <li>g. PAR sebesar 22,26%</li> <li>h. NPL sebesar 16,70%</li> </ul>
4	Hasil temuan IC	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pemeriksaan kredit yang dihapus buku (Write Off);</li> <li>b. Pemeriksaan terhadap Agusinus Wahyu Gunawan</li> </ul>

Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB

  
**ABRAHAM THEO P.S**  
 Ketua Rapat

  
**Idrys Afandi**  
 Notulis

# NOTULEN RAPAT PENGURUS MENGENAI RENCANA BISNIS BPR 2021

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 12

Tanggal : 23 November 2020, diruang rapat kantor pusat

---

## Peserta Rapat :

Abraham Theo P.S : Komisaris Utama  
Wirasno : Komisaris  
Rudy Bodewyn M.T : Direktur  
Andanlitya : General Manager  
Lidya Rosmaida : Internal Audit  
Idrus Afandi : Kepala Bagian Operasional  
Arta Sagala : PE Kepatuhan

## Agenda Rapat :

1. Pembahasan Mengenai hasil penilaian SWOT
2. Arahan RBB dari PT NBP
3. Kinerja ringkasan eksekutif RBB 2021
4. Strategi yang akan dilakukan

Rapat dimulai pada pukul : 11.00 WIB

Rapat dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Wirasno

## Keputusan Rapat :

1	Pembahasan mengenai hasil penilaian SWOT	a. Diperoleh hasil bahwa saat ini kondisi BPR berada dalam posisi kuadran III dan menggunakan strategi turn around (merubah strategi)
2	Arahan RBB PT. NBP	a. Pertumbuhan kredit tahun 2021 sebesar 20% b. Kualitas kredit PAR sebesar 15% & NPL 5%

		<p>c. Pertumbuhan sumber dana (tabungan dan deposito) sebesar 15%</p> <p>d. Struktur sumber dana tabungan sebesar</p> <p>e. ROA sebesar 5%</p>
3	Kinerja ringkasan eksekutif RBB 2021	<p>a. Tabungan sebesar Rp. 9.836.95.000,- bertumbuh 5 %</p> <p>b. Deposito sebesar Rp. 8.308.100.000,- bertumbuh 1.02%</p> <p>c. Kredit yang diberikan sebesar Rp. 18.514.655.000,- bertumbuh 35.69%</p> <p>d. Pendapatan sebesar 7.401.627.000 bertumbuh 29.31%</p> <p>e. Total biaya sebesar Rp. 6.747.409 bertumbuh sebesar 9.61%</p> <p>f. EBT sebesar Rp. 654.218.000,- bertumbuh sebesar 251%</p> <p>g. PAR sebesar 13.30%</p> <p>h. NPL sebesar 5.35%</p>
2	Strategi yang akan dilakukan pada 2021	<p>a. Menurunkan suku bunga tabungan insan pada Januari 2021</p> <p>b. Menjual inventaris kantor berupa sepeda motor vario yang berwarna putih minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)</p> <p>c. Merubah pendapatan administrasi tabungan pasif dari Rp. 2.000 menjadi Rp. 4.000,-</p> <p>d. Kantor cabang Karawaci akan diperpanjang 1 tahun dan direncanakan pindah pada bulan Oktober 2021 dengan biaya sewa maksimal 100 juta</p> <p>e. Bekerja sama dengan fintech dalam pembayaran kredit melalui ovo, dana, gopay dll</p>



		f. Akan memaksimalkan produk kredit prima g. Fokus meningkatkan produk tabungan pundi h. Menaikan suku bunga sebesar 1,85%
--	--	--

Rapat ditutup pada pukul 16.00 WIB



**ABRAHAM THEO P.S**  
Ketua Rapat



**Arta Sagala**  
Notulis

**DAFTAR PEMBERIAN KREDIT KEPADA PIHAK TERKAIT  
DESEMBER 2020**

NO	NOREK	NAMA	JABATAN	PLAFOND	OUTSTANDING	KOL	JAMINAN
1	0120101406002788	LIDYA ROSMAIDA SARAGIH	PE. AUDIT INTERN	7,500,000	414,400	1	SKPG
2	0120101406002815	LEO	KEPALA CABANG	12,000,000	4,331,800	1	SKPG
3	0120101406002828	ARTA METIA SAMI SAGALA	PE. KEPATUHAN	20,000,000	10,554,800	1	SKPG
<b>TOTAL</b>				<b>39,500,000</b>	<b>15,301,000</b>		

**PENEMPATAN PADA BANK LAIN TERHADAP PIHAK TERKAIT BPR NBP 12  
DESEMBER 2020**

NO	NAMA BANK	JENIS	NOMINAL	ATAS NAMA
1	BPR NBP 32	DEPOSITO	300,000,000	PT. BPR NBP 12
2	BPR NBP 31	DEPOSITO	200,000,000	PT. BPR NBP 12
<b>TOTAL</b>			<b>500,000,000</b>	

**DEWAN KOMISARIS  
PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 12  
Jl. Raya Puspitek No. 39, Buaran - Serpong  
Tangerang Selatan – Banten**

Nomor : 001/KUM-NBP 12/2021

Jakarta, 7 Januari 2021

Lampiran : -

Kecodaan :

Direksi PT. BPR NBP 12

Di tempat

Dengan hormat,

Perihal : Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2020

Sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan Tahun 2020, tanggal 18 Maret 2020 dimana salah satu keputusannya adalah penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Perseroan untuk tahun buku 2020 melalui surat Dewan Komisaris, maka dengan ini kami sampaikan :

1. Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Perseroan untuk tahun buku 2020 adalah :

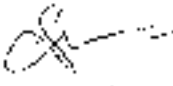
Nama Kantor : KAP Hendra Busroni, Alamsyah  
Alamat Ktr Pusat : Jln Hamid Rusdi NO.10 D Malang 65121  
Email : hendra\_hbs@gmail.com  
Telepon : 0341 3613709

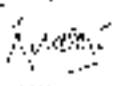
Alamat Ktr Cabang : Jln R.A.A. Martanegara No.66 A Bandung /0264  
Email : kapi\_baldg@gmail.com  
Telepon : 072-27326219

2. Untuk itu agar Saudara menghubungi KAP tersebut untuk dibuatkan perjanjian dan biaya audit
3. Agar dipersiapkan dokumen dan hal lainnya yang diperlukan sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar serta memerhatikan kontribusi pekerjaan KAP
4. Selanjutnya agar dipastikan bahwa KAP tersebut telah membentahukan kepada OJK serta terschutz di atas sebelum pemeriksaan dilaksanakan
5. Untuk biaya audit agar dibicarakan dan besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditunjukkan dalam Perjanjian

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya

Salam Sejahtera  
Dewan Komisaris

  
Abrahami Dede Silaban  
Komisaris Utama

  
Wirasno  
Komisaris

**Rekomendasi Komite Audit Dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik**

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan dasar tahun buku 2020, kami merekomendasikan penggunaan jasa dari AP dan KAP Hendro, Busroni, Alamsyah


Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud sebagai berikut:

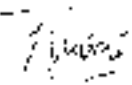
1. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP  
KAP tersebut dan orang yang berada di dalamnya bekerja dengan Independen dan terdaftar sebagai Auditor Bank di OJK
2. Ruang lingkup audit  
Adapun ruang lingkup Audit yang akan dilakukan adalah Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut:
  - Pengalangan kualitas asset produktif
  - Penilaian terhadap asset lain-lain dan AYDA
  - Kewajaran atas transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
  - Jumlah dan penyediaan dana kepada pihak terkait
  - Rincian pelanggaran dan pelanggaran BMPK
  - UGR, ROA, JOPD
3. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP Kantor Akuntan Publik Hendro, Busroni, Alamsyah diyakini mempunyai keahlian dan pengalaman melakukan pemeriksaan di BPR. Hal ini karena KAP tersebut telah berpengalaman untuk melakukan Audit pada beberapa BPR antara lain PT.BPR Adh sa Jaya, PT. BPR Bahwa Masyarakat, PT.BPR Muzumma Tebuteng, PT.BPR Buana Cipta Sejahtera, PT.BPR Acharya Arta, PT.BPR Semesta Megadana, PT.BPR Ptihi Gunung, PT.BPR Aci Waiga Mulia dan BPR lainnya
4. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP:
  - Penentuan basis data
  - Perencanaan dan perancangan pendekatan Audit
  - Pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif
  - Pelaksanaan prosedur analisis dan pengujian terinci
  - Penyelesaian Audit dan Penerbitan Laporan Audit
5. Memberi *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP dan Tim Audit dari KAP  
Dengan adanya penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP maka diharapkan AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP tersebut dapat melihat hal yang baru atau permasalahan yang tidak ditemukan oleh AP, KAP, dan Tim Audit yang sebelumnya, sehingga BPR dapat dengan segera memperbaiki temuan tersebut

6. Kantor Akuntan Publik Hendro, Burhan, Alamsyah dan... memeriksa BPR untuk pertama kalinya.
7. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya  
Pemeriksaan pada tahun buku sebelumnya dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Lesta, Mirwan, Syafuddin & Rekan, dan secara keseluruhan telah sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dengan menguji kewajaran laporan keuangan PT BPR NBF 12 yang disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akutabilitas Publik (SAK-ETAP).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Salam sejahtera  
Dewan Komisaris

  
Abraham Thien Silaban  
Komisaris Utama

  
Wiranto  
Komisaris

## LEMBAR PENGESAHAN RENCANA BISNIS BPR 2021

Setelah membaca, mempelajari, dan mendapat penjelasan dari Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 12, dengan ini kami atas nama Pemegang Saham menerima dan mengesahkan Rencana Kerja Tahun 2021, untuk dapat dipedomani dalam pelaksanaan operasional PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 12 dengan sebaik-baiknya.

Serpong, 14 Desember 2020  
PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 12

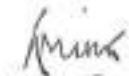
Menyetujui,



Rudy Bodewyn M. T  
Direktur



Abraham T. Silaban  
Komisaris Utama



M. Wirasno  
Komisaris

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>			(Wajib diisi oleh BPR)
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	4	Kurang Baik
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Cukup Baik
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Baik
4.	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Baik
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Baik
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Sangat Baik
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Sangat Baik
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Baik
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Baik



10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Baik
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Baik
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Baik
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Baik
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Sangat Baik
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Sangat Baik
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Baik
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Baik
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Cukup Baik
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Baik

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>			(Wajib diisi oleh BPR)
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
1.	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.</p>	1	Sangat Baik
2.	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Sangat Baik
3.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Sangat Baik
4.	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Cukup Baik
5.	<p>BPR memiliki Komisaris Independen:</p> <p>a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b>, paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.</p> <p><b>*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)</b> diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	Baik
6.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Baik
7.	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Baik
8.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Sangat Baik
9.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Baik
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			

10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Baik
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Baik
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Baik
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Baik
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Baik
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Baik
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Baik
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Baik
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Baik

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>IV.</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Cukup Baik
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Baik
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
3.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Baik

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>V.</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b>                      Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:                      a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;                      b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan                      c. mampu bekerja secara independen.</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	4	Kurang Baik
2.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	4	Kurang Baik
3.	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b>                      Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b>                      Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Baik
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Baik
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Baik
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Cukup Baik
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Cukup Baik
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Cukup Baik

9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Baik
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Cukup Baik
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Cukup Baik
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	4	Kurang Baik
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	Kurang Baik

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>VI.</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.</p>	1	Sangat Baik
2.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Baik
3.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Baik
4.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Baik
5.	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Cukup Baik
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
6.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Baik
7.	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.</p> <p><b>*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	Baik
8.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Baik
9.	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Baik
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		

10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Baik
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Cukup Baik
12	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. <b>*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Baik
13	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sangat Baik



**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A (laporan keuangan diaudit), B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>VII.</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset ≥ Rp 10 miliar)</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Baik
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Baik
3.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Baik
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Baik
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Baik

Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk seluruh kriteria/indikator pada faktor ini.

Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan dengan nilai 0

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D  
DIISI SETELAH MANAJEMEN RISIKO BERLAKU SECARA EFEKTIF  
BPR MODAL INTI ≥ 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2020  
BPR MODAL INTI < 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2021**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>VIII.</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	Sangat Baik
2.	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Baik
3.	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Baik
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4.	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	Cukup Baik
5.	<p>Dewan Komisaris:</p> <p>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p>	3	Cukup Baik
6.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Cukup Baik
7.	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Baik
8.	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Baik
9.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Cukup Baik

10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Cukup Baik
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Baik
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Cukup Baik

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>IX.</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Baik
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Baik
3.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Baik
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Baik
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Baik

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

<b>No</b>	<b>Kriteria / Indikator</b>	<b>Skala Penerapan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>X.</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Baik
2.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Baik
3.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Baik
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4.	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Baik
5.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Baik
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
6.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Baik

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>XI.</b>	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Cukup Baik
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Baik
3.	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Baik
4.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Baik
5.	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Baik
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
6.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Baik
7.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Baik



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0403547  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA  
BONA PASOGIT 12**

Kepada Yth.  
Notaris QUORIENA JULIA SARI, SH  
Jl. Ietda Nasir, ruko Cibubur  
Country RBOC 01B, Desa Cikeas  
Udik, Kecamatan Gunung Putri,  
Kabupaten Bogor  
KABUPATEN BOGOR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 03 November 2020 yang dibuat oleh Notaris QUORIENA JULIA SARI, SH, berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT 12**, berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 03 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 November 2020

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0183538.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 03 November 2020**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keputusan Menteri ini dicetak dari  
Sistem Administrasi Badan Hukum.  
Notaris di Kabupaten Bogor,

**QUORIENA JULIA SARI, SH.**

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SIRKULER

SEBAGAI PENGGANTI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

NUSANTARA BONA PASOGIT 12

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 03-11-2020 (tiga November tahun dua ribu dua puluh), pukul 13.35 WIB (tiga belas lewat tiga puluh lima menit----- Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, QUORIENA JULIA SARI, Sarjana Hukum,-----  
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya,-----  
Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir-----

Akta ini:-----

-Tuan RUDY BODEWYN MANGASA TUA, lahir di Jakarta, pada tanggal-  
21-10-1974 (dua puluh satu Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh-  
puluh empat), karyawan swasta, bertempat tinggal di Tangerang,-----  
Perumahan Griya Jakarta A-2 nomor 22A, Rukun Tetangga 007, Rukun-  
Warga 007, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang,-----  
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk nomor 3674062110740005, yang dikeluarkan tanggal-----  
29-04-2015 (dua puluh sembilan April tahun dua ribu lima belas),-----  
Warga Negara Indonesia;-----

-untuk sementara berada di Kabupaten Bogor.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya-----





selaku Direktur dari Perseroan yang akan disebut dan selaku-----  
kuasa dari Keputusan Pemegang Saham Sirkuler Sebagai Pengganti-----  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BANK  
PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT 12, berkedudukan  
di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana ternyata-----  
dalam Keputusan Pemegang Saham Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat--  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT-  
NUSANTARA BONA PASOGIT 12, yang dibuat dibawah tangan dan-----  
bermaterai cukup pada tanggal 31-10-2020 (tiga puluh satu Oktober--  
tahun dua ribu dua puluh), yang aslinya dilekatkan pada minuta Akta--  
ini, demikian dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama seluruh----  
Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
NUSANTARA BONA PASOGIT 12, berkedudukan di Kota Tangerang-----  
Selatan, Provinsi Banten, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta-  
tanggal 04-12-1991 (empat Desember tahun seribu sembilan ratus-----  
sembilan puluh satu) nomor 84 dan Akta tanggal 18-08-1992 (delapan--  
belas Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) nomor-  
337, keduanya dibuat dihadapan RICHARDUS NANGKIH SINULINGGA,-  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan--  
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan---  
tanggal 29-08-1992 (dua puluh sembilan Agustus tahun seribu sembilan  
ratus sembilan puluh dua) nomor C2-7204 HT.01.01.TH.92, serta telah  
beberapa kali mengalami perubahan, antara lain tetapi tidak terbatas--  
dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 19-06-2008 (sembilan  
belas Juni tahun dua ribu delapan) nomor 06, yang telah mendapat-----

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 14-07-2008 (empat belas----  
Juli tahun dua ribu delapan) nomor AHU-40984.AH.01.02.Tahun 2008,-  
dan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 18-01-2011-----  
(delapan belas Januari tahun dua ribu sebelas) nomor 02, yang telah---  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 03-05-2011 (tiga--  
Mei tahun dua ribu sebelas) nomor AHU-22030.AH.01.02.Tahun 2011,-  
dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 07-03-2013 (tujuh---  
Maret tahun dua ribu tiga belas) nomor 05, yang telah diberitahukan ke-  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----  
bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal--  
12-04-2013 (dua belas April tahun dua ribu tiga belas) nomor-----  
AHU-AH.01.10-13577, dan dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan  
Rapat tanggal 04-09-2013 (empat September tahun dua ribu tiga belas)-  
nomor 01, yang telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan tanggal 16-10-2013 (enam belas Oktober----  
tahun dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-42162, dan dengan----  
Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 14-03-2014 (empat belas-----  
Maret tahun dua ribu empat belas) nomor 04, yang telah diberitahukan  
ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-  
bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal--  
02-06-2014 (dua Juni tahun dua ribu empat belas) nomor-----  
AHU-AH.01.10.18814, dan dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan-

Rapat tanggal 07-08-2014 (tujuh Agustus tahun dua ribu empat belas)-  
nomor 01, yang telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi-  
Manusia Republik Indonesia dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan-  
Perubahan Data Perseroan tanggal 08-08-2014 (delapan Agustus tahun-  
dua ribu empat belas) nomor AHU-23153.40.22.2014, dan selanjutnya-  
dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 21-11-2014-  
(dua puluh satu November tahun dua ribu empat belas) nomor 03, yang-  
telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan-----  
Perubahan Data Perseroan tanggal 25-11-2014 (dua puluh lima-----  
November tahun dua ribu empat belas) nomor AHU-42985.40.22.2014,-  
dan dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal-----  
12-03-2015 (dua belas Maret tahun dua ribu lima belas) nomor 03, yang  
telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data----  
Perseroan tanggal 12-03-2015 (dua belas Maret tahun dua ribu lima----  
belas) nomor AHU-AH.01.03-0015662, dan dirubah dengan Akta-----  
Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 16-05-2015 (enam belas Mei tahun  
dua ribu lima belas) nomor 01, yang telah diberitahukan ke Menteri-----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan bukti-----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal-----  
18-05-2015 (delapan belas Mei tahun dua ribu lima belas) nomor-----  
AHU-AH.01.03-0932399, dan selanjutnya dirubah dengan Akta-----  
Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 29-09-2015 (dua puluh-----  
sembilan September tahun dua ribu lima belas) nomor 03, yang telah---

diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-----  
Anggaran Dasar tanggal 29-09-2015 (dua puluh sembilan September----  
tahun dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0968200 dan-----  
dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan---  
tanggal 29-09-2015 (dua puluh sembilan September tahun dua ribu lima  
belas) nomor AHU-AH.01.03-0968201, dan dirubah dengan Akta-----  
Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 19-07-2016 (sembilan belas Juli--  
tahun dua ribu enam belas) nomor 01, yang telah diberitahukan ke-----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----  
bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal---  
20-07-2016 (dua puluh Juli tahun dua ribu enam belas) nomor-----  
AHU-AH.01.03-0065426, dan dirubah dengan Akta Pernyataan-----  
Keputusan Rapat tanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September tahun-  
dua ribu enam belas) nomor 01, yang telah diberitahukan ke Menteri---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan bukti-----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal-----  
23-09-2016 (dua puluh tiga September tahun dua ribu enam belas)----  
nomor AHU-AH.01.03-0082693, dan dirubah dengan Akta Pernyataan  
Keputusan Pemegang Saham Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31-01-2017 (tiga puluh satu-----  
Januari tahun dua ribu tujuh belas) nomor 01, yang telah diberitahukan-  
ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan---  
bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal----  
31-01-2017 (tiga puluh satu Januari tahun dua ribu tujuh belas) nomor-

AHU-AH.01.03-0041718, dan dirubah dengan Akta Pernyataan-----  
Keputusan Rapat tanggal 20-12-2017 (dua puluh Desember tahun dua  
ribu tujuh belas) nomor 02, yang telah diberitahukan ke Menteri-----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan bukti-----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal-----  
20-12-2017 (dua puluh Desember tahun dua ribu tujuh belas) nomor--  
AHU-AH.01.03-0203416, dan dirubah dengan Akta Pernyataan-----  
Keputusan Rapat tanggal 07-06-2018 (tujuh Juni tahun dua ribu-----  
delapan belas) nomor 02, yang telah diberitahukan ke Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan bukti Penerimaan-----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor-----  
AHU-AH.01.03-0215167 dan dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0215168 tanggal----  
12-06-2018 (dua belas Juni tahun dua ribu delapan belas), dan diruba  
dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 05-07-2019 (lima Ju  
tahun dua ribu sembilan belas) nomor 01, yang telah diberitahukan k  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----  
bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal-  
09-07-2019 (sembilan Juli tahun dua ribu sembilan belas) nomor-----  
AHU.01.03-0295303, dan dirubah dengan Akta Pernyataan-----  
Keputusan Rapat tanggal 12-09-2019 (dua belas September tahun du  
ribu sembilan belas) nomor 01, yang telah diberitahukan ke Menteri--  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan bukti-----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal-----  
12-09-2019 (dua belas September tahun dua ribu sembilan belas) nom

AHU-AH.01.03-0330275, dan dirubah dengan Akta Pernyataan-----  
Keputusan Pemegang Saham Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum--  
Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24-12-2019 (dua puluh empat-----  
Desember tahun dua ribu sembilan belas) nomor 01, yang telah-----  
diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data----  
Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0377806 tanggal 24-12-2019 (dua-----  
puluh empat Desember tahun dua ribu sembilan belas), dan dirubah---  
dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 26-03-2020 (dua-----  
puluh enam Maret tahun dua ribu dua puluh) nomor 04, yang telah-----  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor-----  
AHU-0026105.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 27-03-2020 (dua puluh--  
tujuh Maret tahun dua ribu dua puluh), dan terakhir dirubah dengan---  
Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler Sebagai-----  
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal-----  
29-07-2020 (dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh) nomor-  
01, yang telah diberitahukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi---  
Manusia Republik Indonesia dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan-  
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0316242--  
tanggal 29-07-2020 (dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu dua-----  
puluh), kedua puluh Akta tersebut dibuat dihadapan saya, Notaris,-----  
untuk selanjutnya dalam Akta ini akan disebut "Perseroan".-----  
-Penghadap saya, Notaris kenal.-----  
-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut diatas-----

menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:-----

A. Bahwa Pemegang Saham Perseroan telah membuat Keputusan-----  
Pemegang Saham Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum-----  
Pemegang Saham Luar Biasa PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT-----  
NUSANTARA BONA PASOGIT 12 yang terakhir ditandatangani pada-----  
tanggal 31-10-2020 (tiga puluh satu Oktober tahun dua ribu dua-----  
puluh), untuk selanjutnya disebut "Keputusan Pemegang Saham-----  
Sirkuler";-----

B. Bahwa Keputusan Pemegang Saham Sirkuler disetujui oleh Para-----  
Pemegang Saham yang mewakili 2.700.000 (dua juta tujuh ratus-----  
ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) saham yang telah-----  
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, sehingga-----  
berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan,--  
Keputusan Pemegang Saham Sirkuler ini mempunyai kekuatan-----  
hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah-----  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;-----

C. Bahwa penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas telah-----  
diberi kuasa dengan hak substitusi sebagaimana ternyata dalam-----  
Keputusan Pemegang Saham Sirkuler untuk menyatakan kembali-----  
Keputusan Pemegang Saham Sirkuler tersebut kedalam Akta-----  
Notaris dan memberitahukan kepada Kementerian terkait sesuai-----  
dengan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan diatas,-----  
penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut-----  
didas, dengan ini menyatakan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan WAHIDIN-----  
HUTAPEA sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung dari tanggal---  
26-10-2020 (dua puluh enam Oktober tahun dua ribu dua puluh) dan  
menyetujui pemberian penghargaan kepada Tuan WAHIDIN HUTAPEA  
sebesar 1 (satu) kali gaji pokok ditambah tunjangan tetap dan-----  
memberikan waktu untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang---  
masih ada di Perseroan, paling lambat 1 (satu) bulan ke depan atau--  
sampai dengan tanggal 26-11-2020 (dua puluh enam November tahun  
dua ribu dua puluh).-----

Sehingga susunan Pengurus menjadi:-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : -----

Direktur : RUDY BODEWYN MANGASA TUA-----

KOMISARIS-----

Komisaris Utama : ABRAHAM THEO PASABAM SILABAN-----

Komisaris : WIRASNO-----

2. Perubahan susunan Pengurus Perseroan-----

a. Menyetujui pencalonan Tuan RUDY BODEWYN MANGASA TUA---  
sebagai Direktur Utama Perseroan yang terlebih dahulu diajukan-  
kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengikuti Penilaian-----  
Kemampuan dan Kepatutan;-----

b. Menyetujui pencalonan Tuan ANANDITYA sebagai Direktur yang--  
membawahkan fungsi kepatuhan yang terlebih dahulu diajukan--  
kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengikuti Penilaian-----  
Kemampuan dan Kepatutan.-----



-Akhirnya penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada---  
pegawai kantor Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri-----  
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain-----  
untuk memohon persetujuan dan/atau pelaporan atas perubahan-----  
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat---  
perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga  
yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk----  
berhubungan dengan wakil-wakil atau salah seorang yang dikuasakan---  
untuk menyatakan segala perbuatan dan tambahan yang perlu didalam-  
akta notaris, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala----  
surat dan akta, umumnya menjalankan segala yang perlu dan berguna--  
untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.-

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah Akta-----  
PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SIRKULER SEBAGAI---  
PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BANK-  
PERKREDITAN RAKYAT NUSANTARA BONA PASOGIT 12 ini untuk-----  
dipergunakan dimana perlu.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Bogor, pada---  
hari dan tanggal tersebut pada bagian kepala Akta ini dengan dihadiri oleh  
Nyonya NATALIA TANDABOLA, Sarjana Hukum, lahir di Palembang, pada  
tanggal 11-07-1980 (sebelas Juli tahun seribu sembilan ratus delapan---  
puluh), bertempat tinggal di Bogor, Metland Cileungsi, Cluster Melati----  
DB. 5/42, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Desa Cipenjo,-----  
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk nomor 3201075107800008, yang dikeluarkan tanggal-----  
30-07-2018 (tiga puluh Juli tahun dua ribu delapan belas), Warga Negara-  
Indonesia; dan Nyonya EVAYANTA GINTING, lahir di Medan, pada tanggal  
20-05-1988 (dua puluh Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh-  
delapan), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Swadaya II, Rukun Tetangga  
008, Rukun Warga 005, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas,-----  
Kotamadya Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----  
3175096005880014, yang dikeluarkan tanggal 27-01-2012 (dua puluh---  
tujuh Januari tahun dua ribu dua belas), Warga Negara Indonesia, untuk-  
sementara berada di Kabupaten Bogor; keduanya pegawai kantor Notaris-  
sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah Akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada-----  
penghadap dan saksi-saksi, maka Akta ini ditandatangani oleh-----  
penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. Disamping itu penghadap juga  
membubuhkan cap ibu jari tangan kanannya pada lembar terpisah yang  
dilekatkan pada minuta Akta ini.-----

-Dilaksanakan dengan tidak ada perubahan.-----

-Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Bogor,

  
QUORIENNA JULIA SARI, S.H.

